



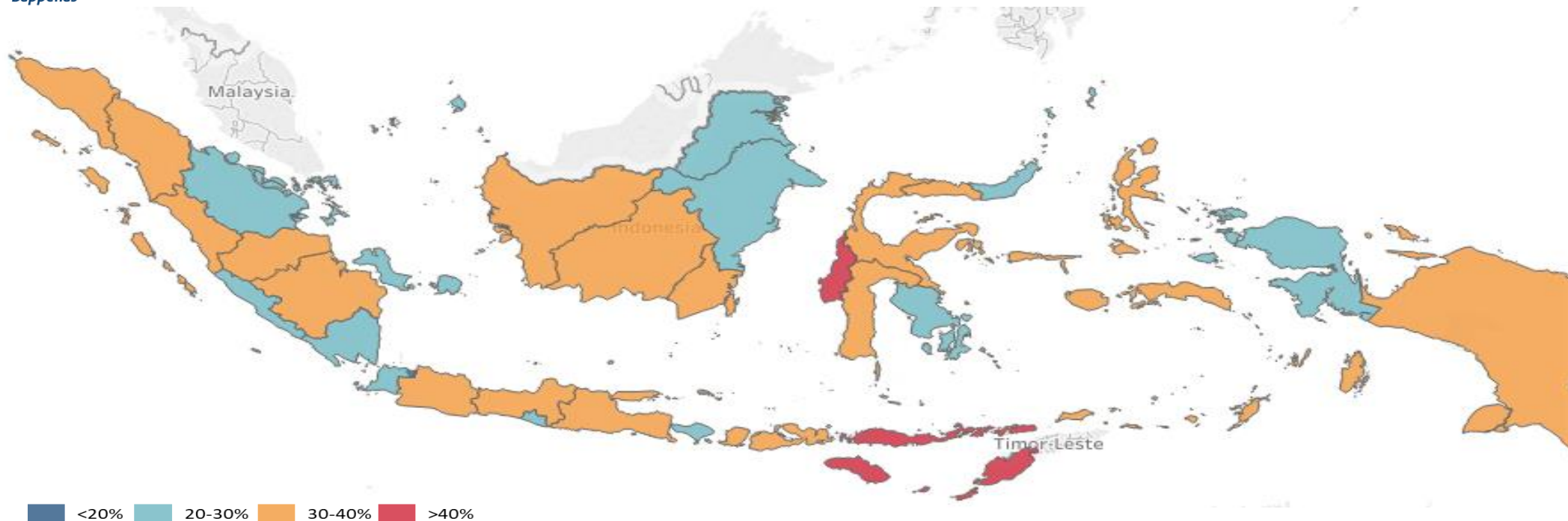
**Kementerian PPN/
Bappenas**

Upaya Pemprov dan Kabupaten/Kota di Kalsel dalam Percepatan Penurunan Stunting

Didy Ariady, SKM,M.Kes
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan



Permasalahan Stunting di Indonesia

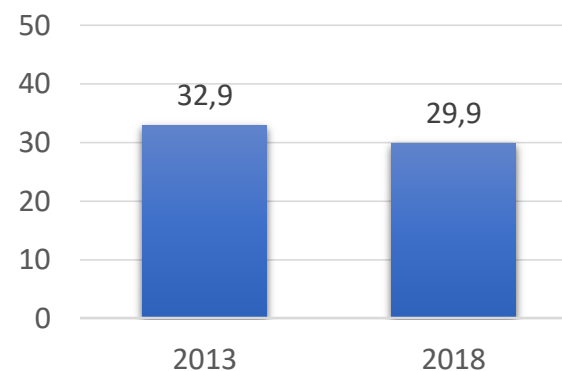


- Prevalensi *stunting* di tingkat provinsi masih sangat tinggi
- 2 provinsi memiliki prevalensi *stunting* >40%
- 18 provinsi yang memiliki prevalensi *stunting* 30-40%
- 23 provinsi yang memiliki prevalensi *stunting* 20-30%
- Hanya DKI Jakarta yang memiliki prevalensi *stunting* <20%

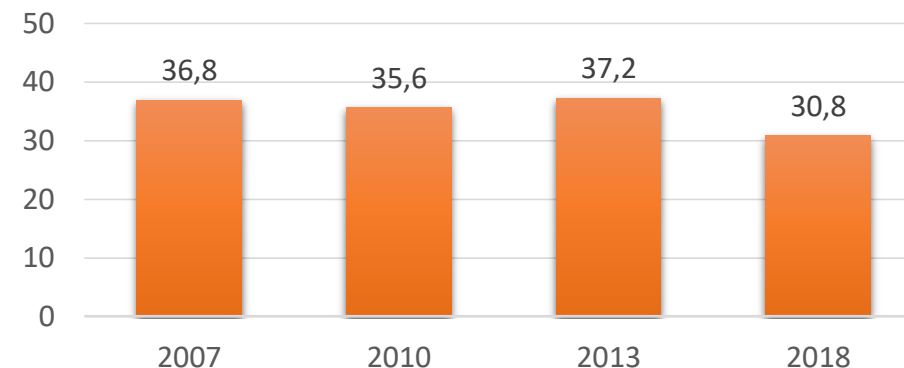


Stunting (kerdil) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Prevalensi Stunting pada Baduta (Riskesdas)

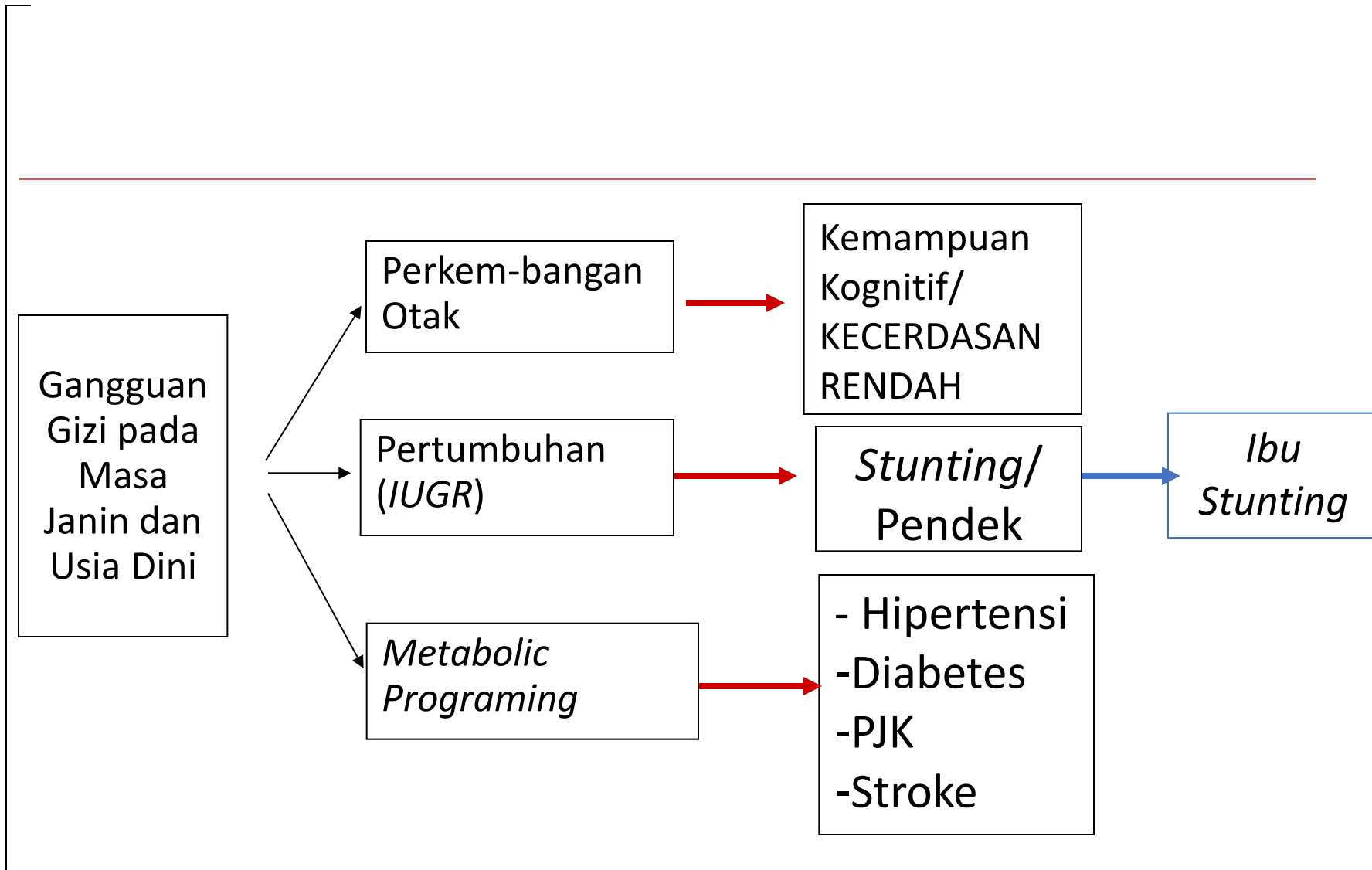


Prevalensi Stunting pada Balita (Riskesdas)



1 dari 3
Baduta & Balita
di Indonesia
Stunting

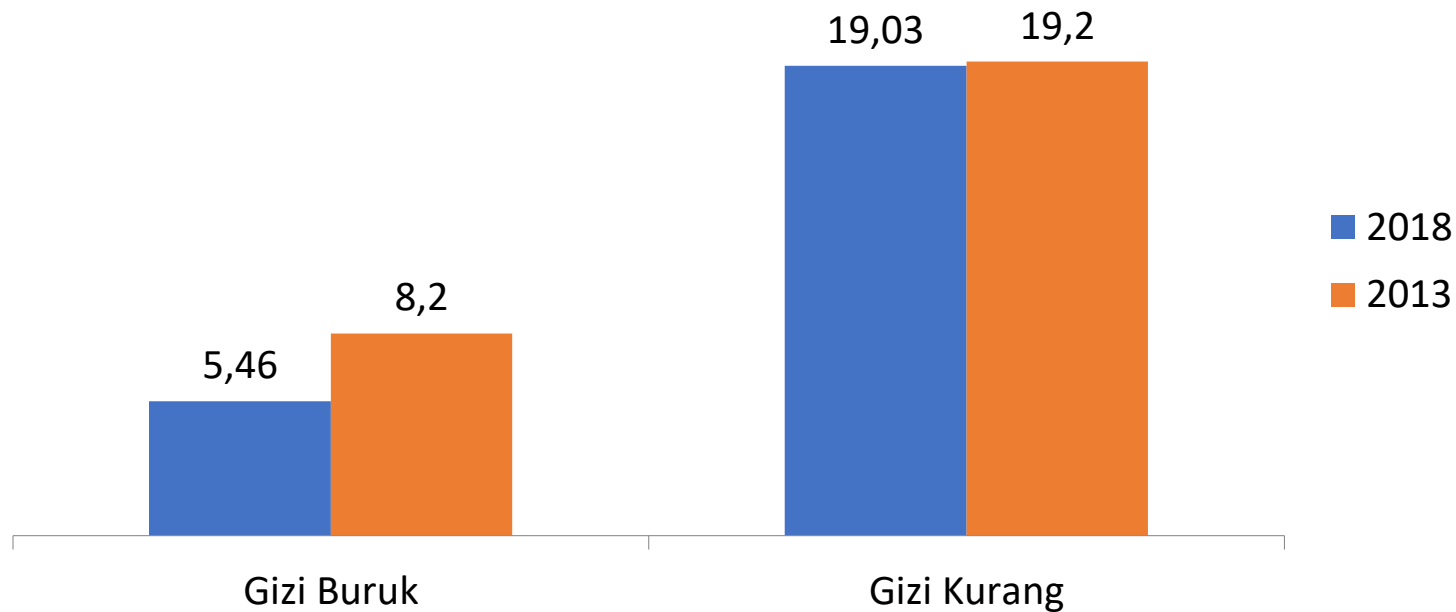
Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang Akibat Gangguan Gizi Pada 1000 HPK





STATUS GIZI

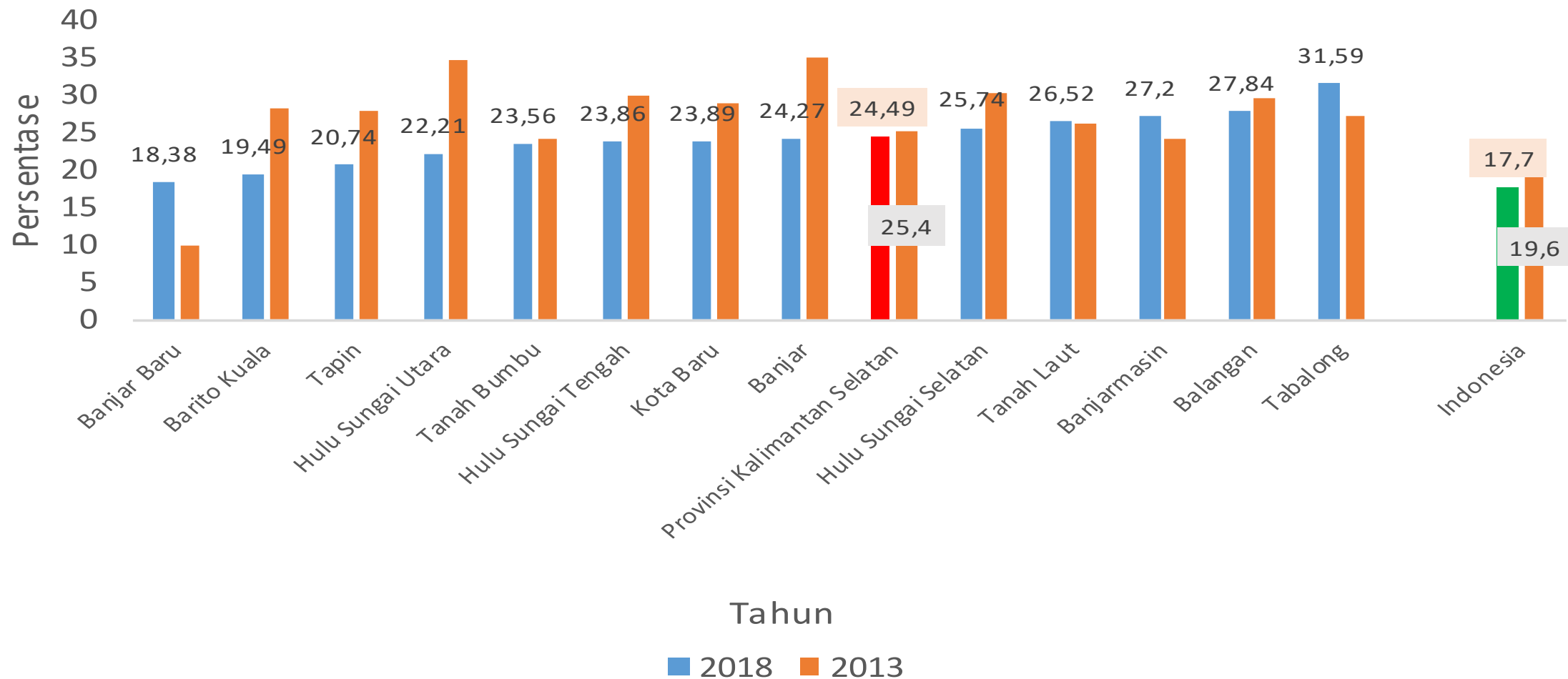
PROPORSI STATUS GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, 2013 - 2018



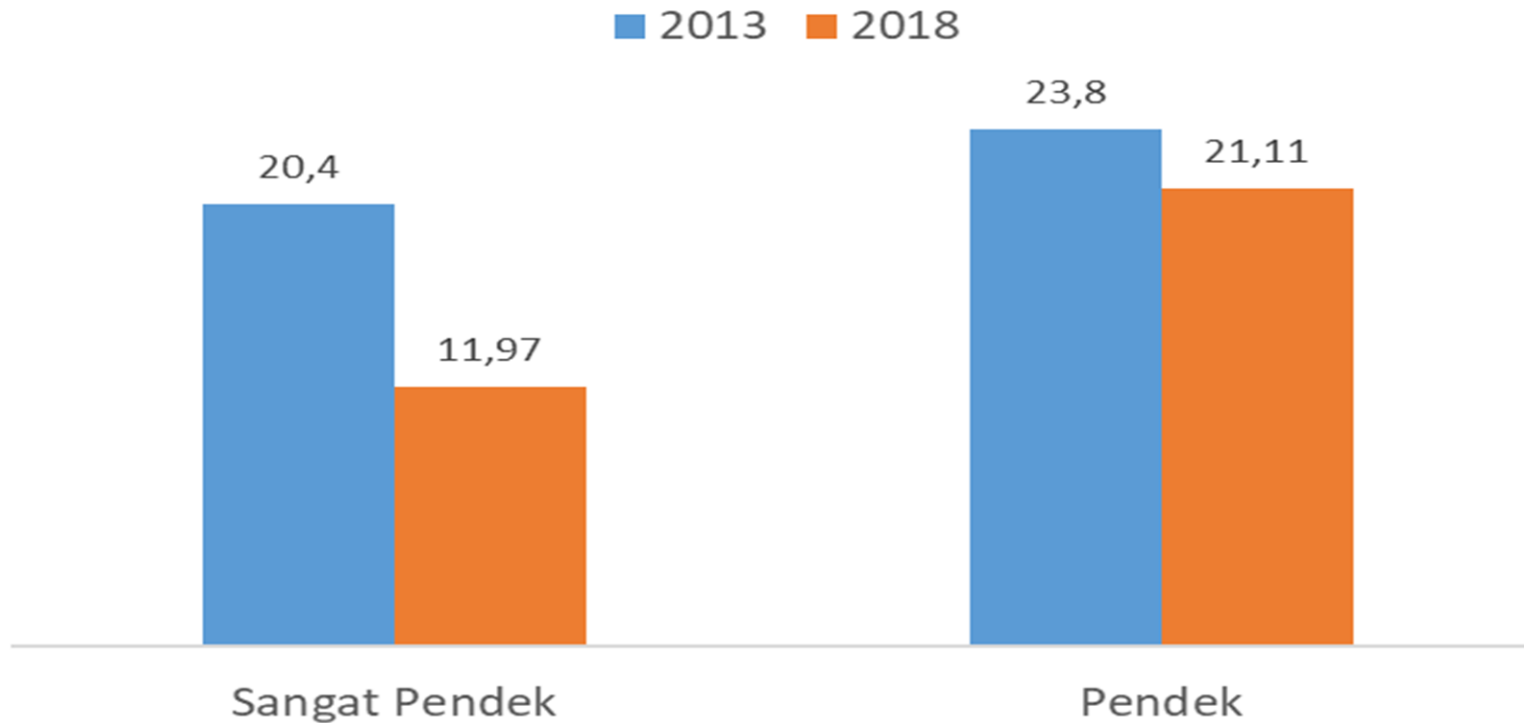
- **2013:** Gizi Kurang dan Buruk 27,4%
- **2018:** Gizi Kurang dan Buruk 24,49%



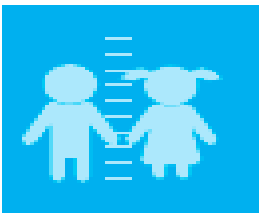
PROPORSI STATUS GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, RISKESDAS 2013-2018



PROPORSI STATUS GIZI SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, 2013-2018



- **2013:** Sangat pendek dan pendek 44,2%
- **2018:** Sangat pendek dan pendek 33.08%

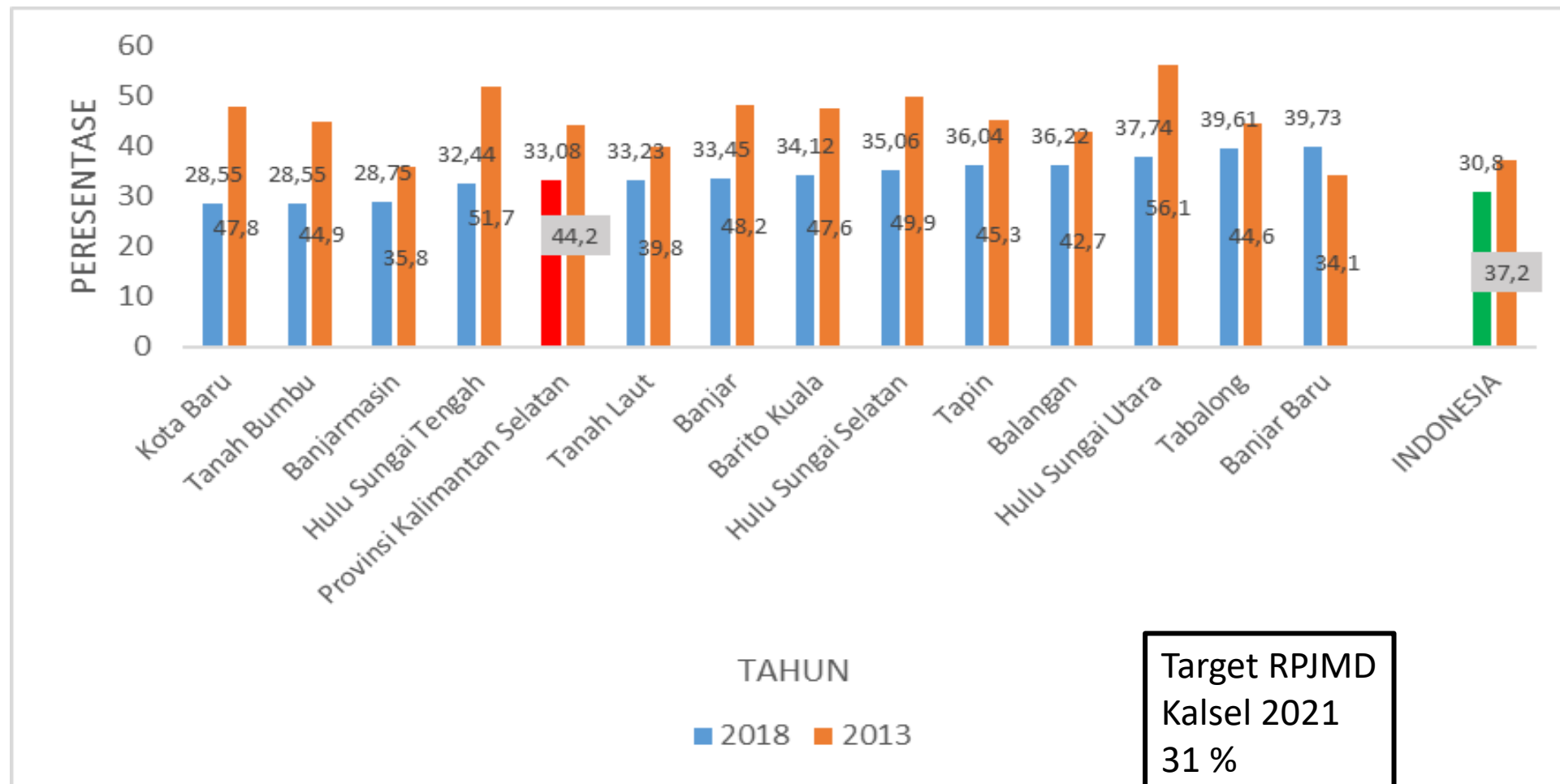


Indikator tinggi badan menurut umur (TB/U):

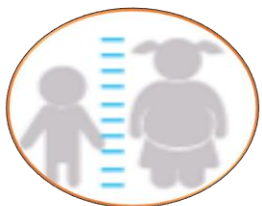
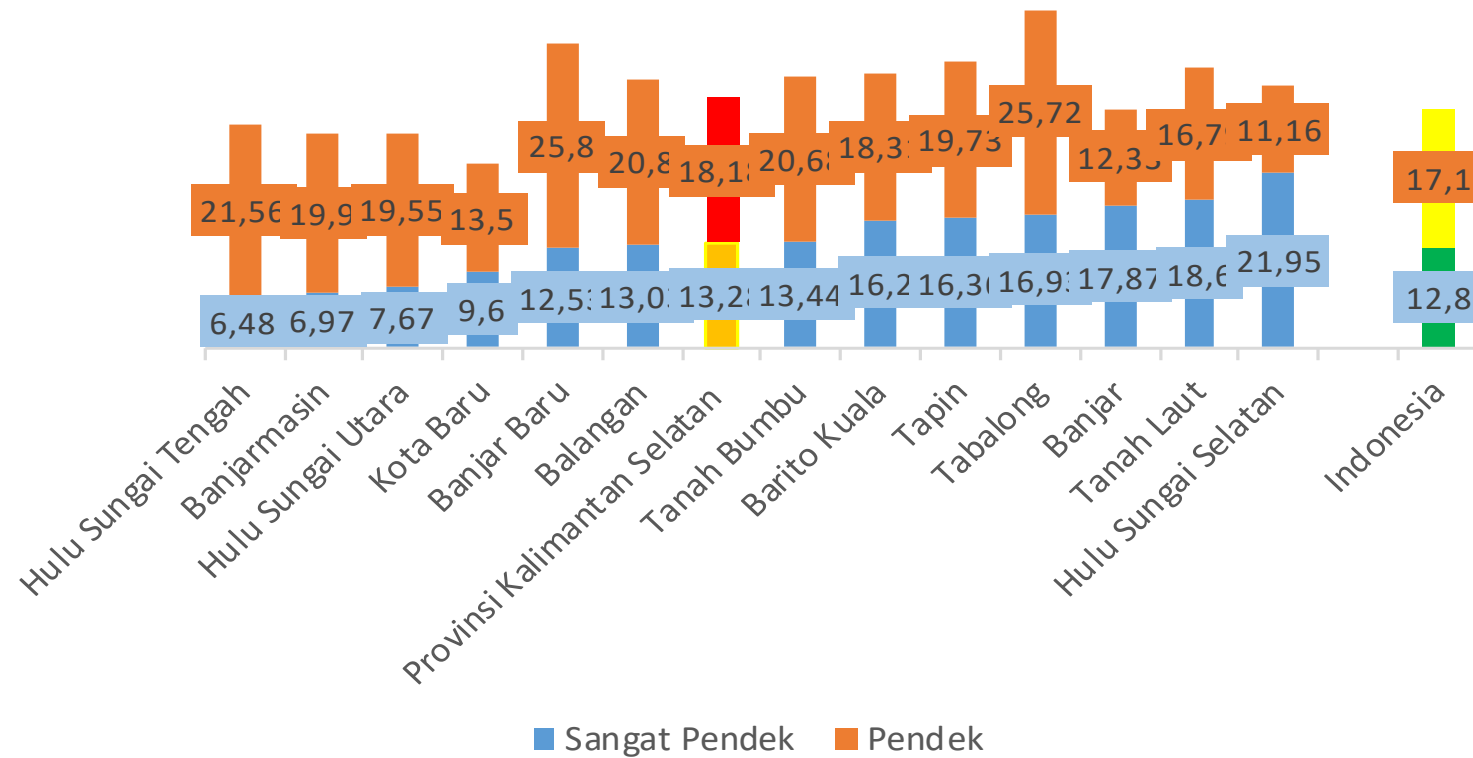
• Sangat pendek : TB/U < -3SD

• Pendek : TB/U \geq -3SD s/d < -2SD

PROPORSI STATUS GIZI SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, 2013-2018



PROPORSI STATUS GIZI SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BADUTA MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, 2018



Balita gizi sangat pendek dan pendek

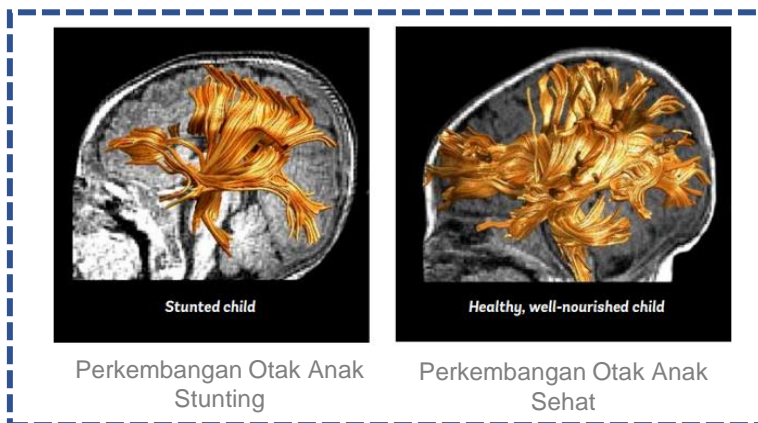
Riskesdas 2018
29,9% (baduta)

vs

Target RPJMN 2019
28% (baduta)

Dampak Stunting

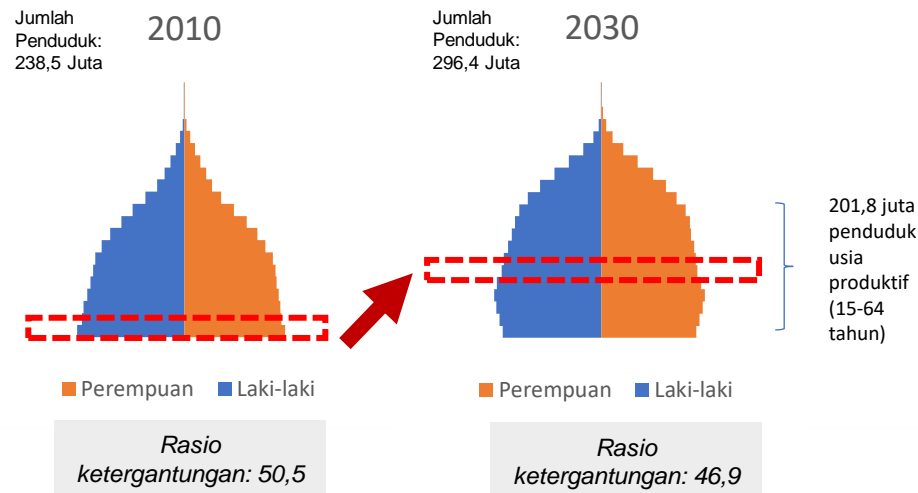
Dampak Kesehatan



- ✓ **Gagal tumbuh** (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus)
- ✓ **Hambatan perkembangan** kognitif dan motorik
- ✓ **Gangguan metabolik** pada saat dewasa → risiko penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung)

Sumber:
 • Kakietek, Jakub, Julia Dayton Eberwein, Dylan Walters, and Meera Shekar. 2017. *Unleashing Gains in Economic Productivity with Investments in Nutrition*. Washington, DC: World Bank Group
 • www.GlobalNutritionSeries.org

Dampak Pertumbuhan Penduduk



Sumber: Proyeksi Penduduk, 2010-2045

Stunting pada Balita:

- 15 tahun mendatang menjadi generasi penduduk usia produktif
- Menurunkan produktivitas SDM
- Bonus Demografi tidak dimanfaatkan dengan baik

Perbaikan kualitas SDM:

- investasi pendidikan dan kesehatan pada anak → **pencegahan stunting**
- peningkatan kesehatan perempuan

Dampak Ekonomi

Potensi kerugian ekonomi
 setiap tahunnya: **2-3% dari GDP**

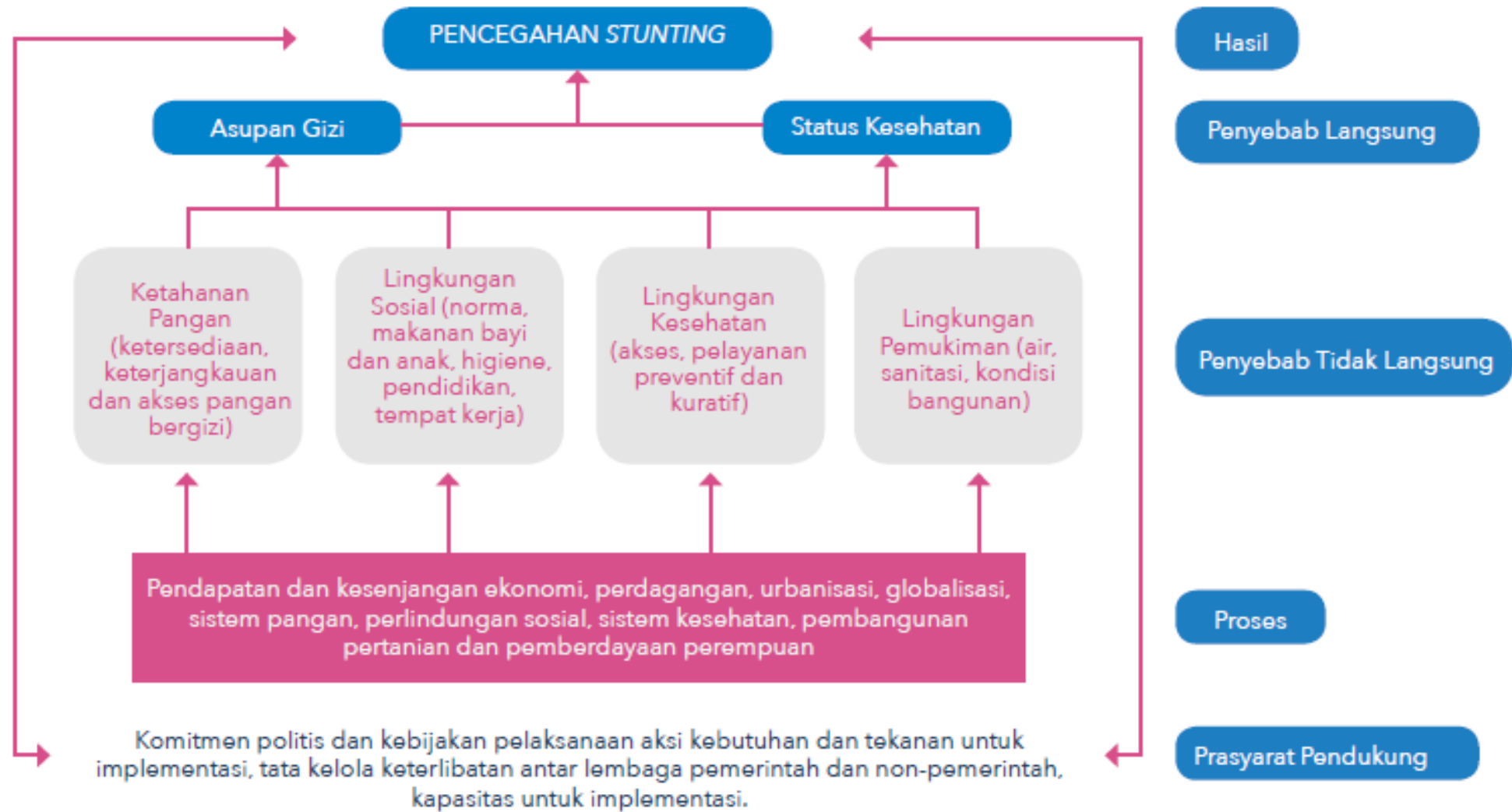


The Worldbank, 2016

Potensi keuntungan ekonomi dari investasi penurunan *stunting* di Indonesia:
48 kali lipat

Hoddinott, et al, 2013
 International Food Policy Research Institute

Kerangka Penyebab Stunting di Indonesia



Sumber: UNICEF 1997; IFPRI, 2016; BAPPENAS 2018, disesuaikan dengan konteks Indonesia

Tantangan Percepatan Pencegahan Stunting

1

Belum efektif dan meluasnya upaya pencegahan stunting



2

Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif
(perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan money)



3

Belum efektifnya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana



4

Terbatasnya kapasitas penyelenggara program



5

Belum optimalnya advokasi, peningkatan kesadaran masyarakat dan sosialisasi terkait stunting, serta keterlibatan warga



Pelibatan
multisektor melalui
intervensi
penanganan
stunting terintegrasi

Sasaran Pokok Pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat RPJMN 2015-2019

Indikator	Status Awal (Riskesdas 2013)	Capaian Saat Ini (Riskesdas 2018)	Target 2019
2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat			
Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)	37.1	48.9	28.0
Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen)	10.2	6.2	8.0
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	38.0	37.3	50.0
Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19.6	17.7	17.0
Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (persen)	12.1	10.2	9.5
Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)	32.9	29.9	28.0
3. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan			
Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15.4	21.8	15.4

Sumber: Buku II Agenda Pembangunan Bidang RPJMN 2015-2019

Strategi Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dalam RPJMN 2015-2019

1. Peningkatan surveilens gizi

Termasuk pemantauan pertumbuhan



4. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi

Terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD)

2. Peningkatan akses & mutu paket pelayanan kesehatan & gizi

Fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil, termasuk pemberian makanan tambahan, terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK



RPJMN
2015-2019



5. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan

Khususnya untuk regulasi dan standar gizi

3. Peningkatan promosi perilaku masyarakat

Mengenai kesehatan, gizi, sanitasi, *hygiene*, dan pengasuhan



6. Penguatan peran lintas sektor

Dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi

Program Prioritas pada Prioritas Nasional 1

Rancangan RKP 2019

Penurunan *stunting* memerlukan upaya yang bersifat lintas sektor melalui intervensi yang menyeluruh



Perencanaan dan Penganggaran terkait Stunting

Upaya percepatan perbaikan gizi fokus pada satu isu strategis, yaitu penurunan stunting terintegrasi

1.

TEMATIK



HOLISTIK

2.

Penanganan stunting dengan intervensi spesifik dan sensitif gizi

Program yang dinilai efektif menurunkan stunting diintegrasikan secara multisektor

3.

INTEGRATIF



SPASIAL

4.

Penanganan stunting diprioritaskan kepada daerah yang bermasalah gizi

- Penurunan *stunting* memerlukan upaya yang bersifat lintas sektor melalui intervensi yang menyeluruh

Kementerian/Lembaga Berkolaborasi untuk Percepatan Pencegahan *Stunting*



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Republik Indonesia



Cegah Stunting, Itu Penting!



Komitmen Presiden dan Wakil Presiden



12 Juli 2017 : Wakil Presiden memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Ratas) dan memutuskan bahwa pencegahan *stunting* penting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui konvergensi program di semua tingkatan



9 Agustus 2017 : Wakil Presiden memimpin Ratas yang menetapkan **5 Pilar Pencegahan *Stunting*:**

1. Komitmen dan Visi Kepemimpinan;
2. Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku;
3. Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa;
4. Gizi dan Ketahanan Pangan; dan
5. Pemantauan dan Evaluasi.



5 April 2018: Presiden memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penurunan Stunting dan memberikan arahan bahwa penurunan stunting penting dilakukan dengan melibatkan seluruh sektor melalui integrasi program di semua tingkatan serta pentingnya kampanye gizi nasional

Logical Framework Intervensi Terintegrasi



Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018 – 2024



PIC: Bappenas
& Kemendagri



PIC: Kemenkes
& Kominfo



PIC: Kementan &
Kemenkes



PIC: Setwapres/
TNP2K



PIC: Setwapres/
TNP2K



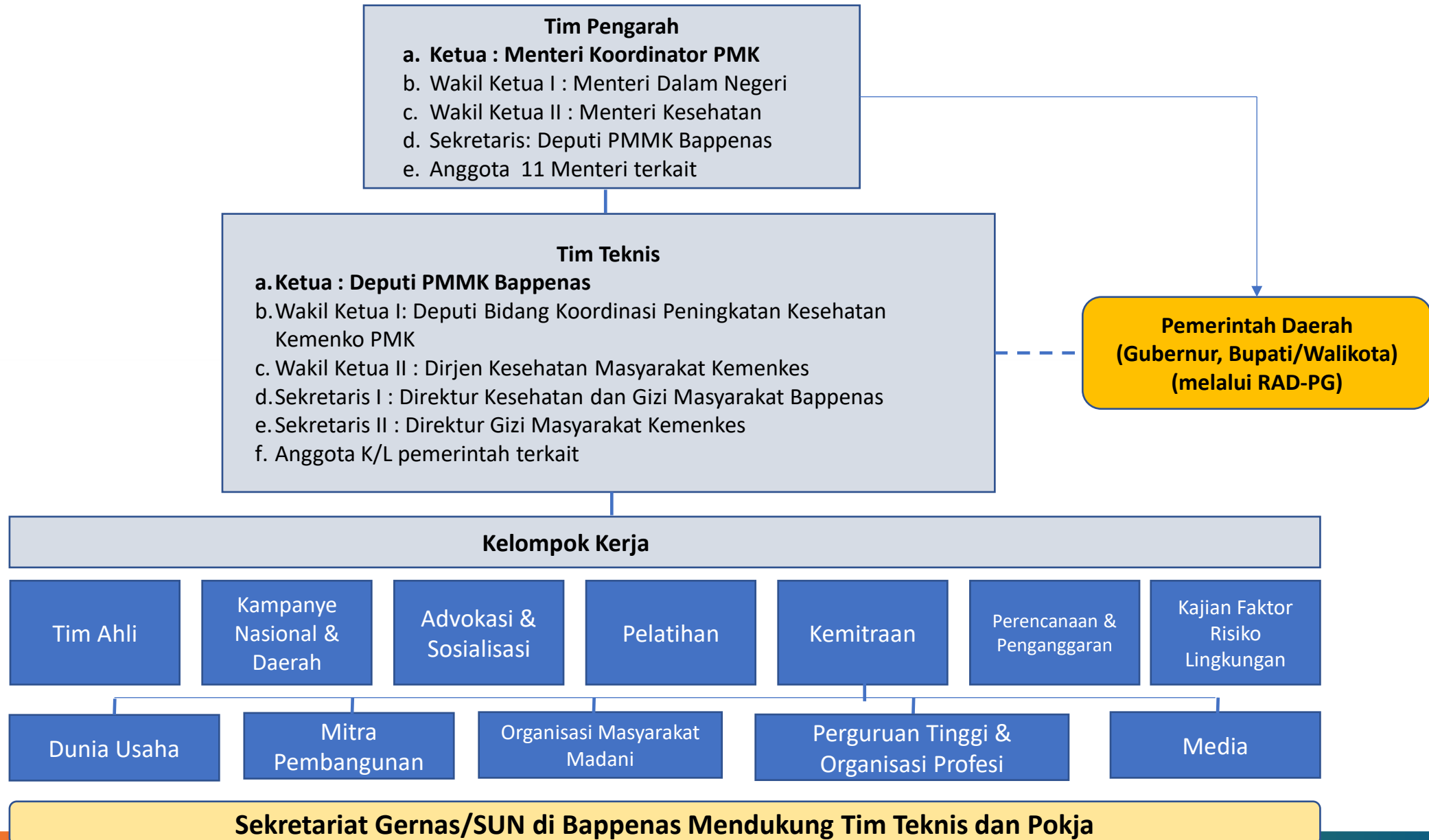
Dokumen lengkap dapat diunduh pada tautan:

<http://bit.ly/StranasStunting>

Surveilans gizi dapat menjadi salah satu data dalam pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting

Struktur Organisasi Gernas Percepatan Perbaikan Gizi Berdasarkan Perpres No. 42 Tahun 2013)*

*) Akan direvisi sesuai dengan perkembangan saat ini



Pendekatan Multisektor dalam Pencegahan Stunting Terintegrasi 2018-2019

Intervensi Gizi Spesifik

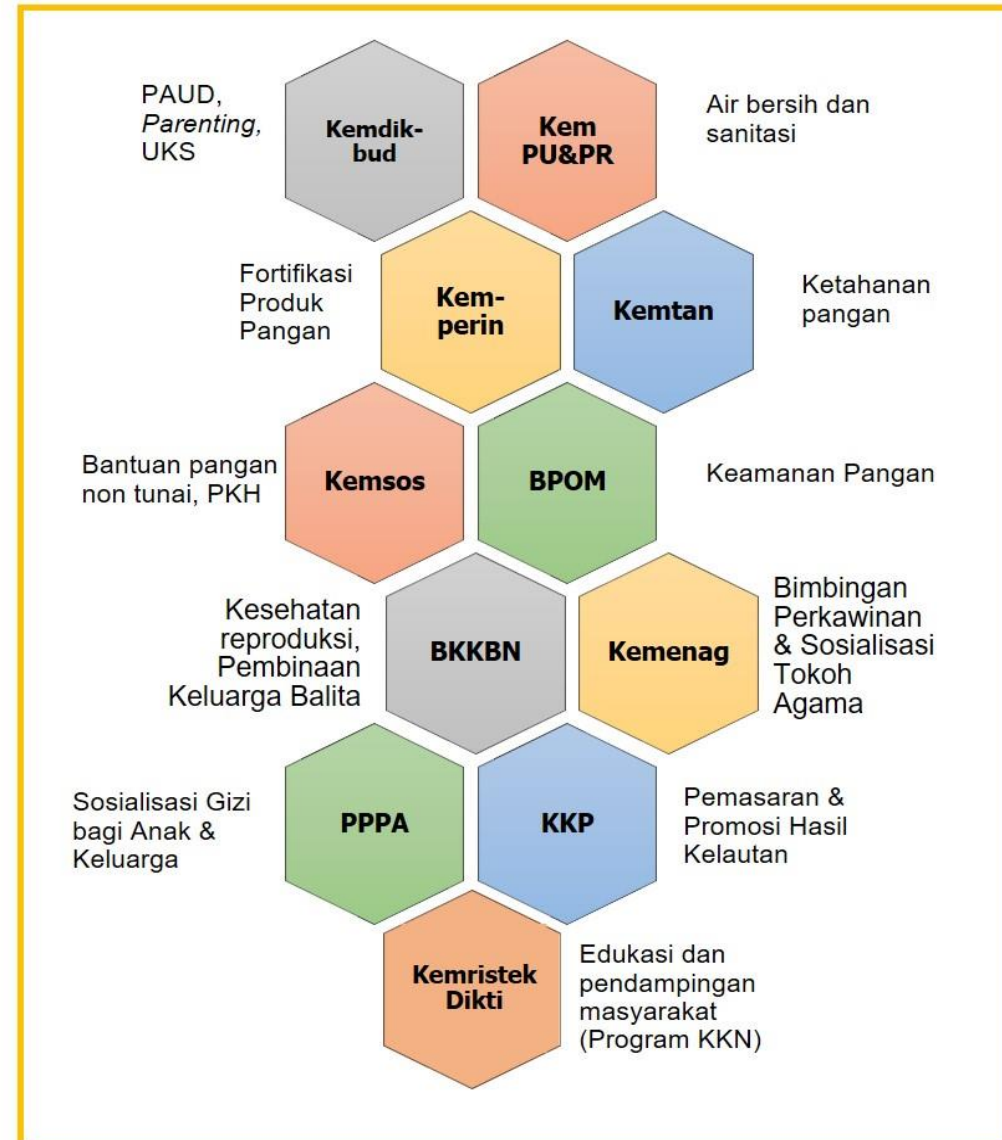
Kemenkes

- Promosi ASI Eksklusif, MP-ASI
- Suplementasi gizi makro dan mikro (PMT, TTD, Vitamin A, taburia, zinc, kalsium)
- Penanganan kekurangan gizi
- Pemberian obat cacing
- Surveilans Gizi (pemantauan pertumbuhan)

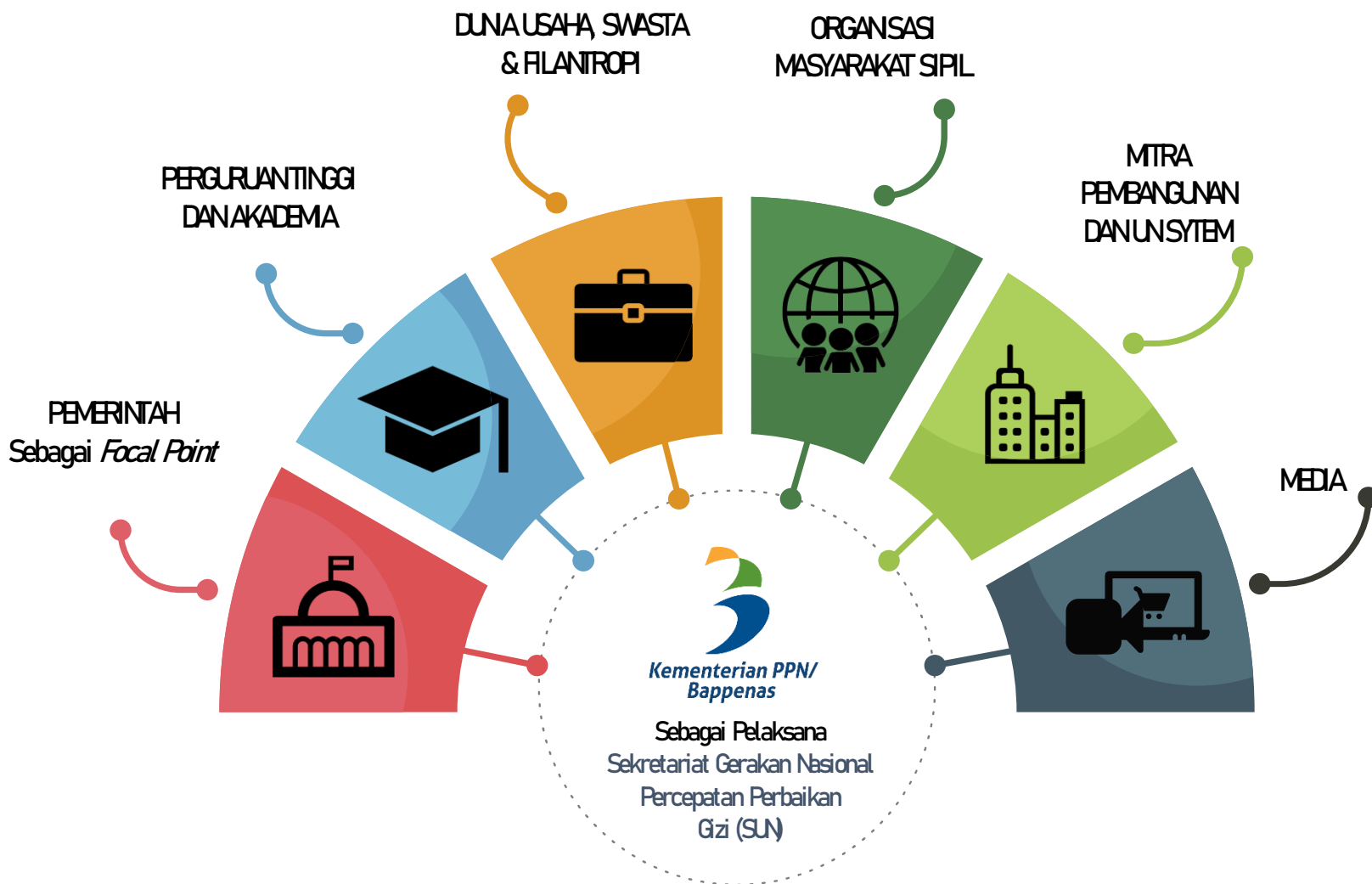
Enabling Factors

- **Kemenko PMK**
- **Bappenas**
- **Kemdagri** (Advokasi Pemda, NIK, Akta Lahir)
- **Kemendes PDTT** (Dana Desa)
- **Kemenkeu** (Sistem Insentif)
- **Kemen Kominfo** (Sosialisasi & Kampanye)

Intervensi Gizi Sensitif



Peran Lintas Sektor dalam Penurunan Stunting



- 17 Kementerian/Lembaga
- Integrasi & sinkronisasi
 - Pelaksanaan intervensi
 - Penggerakkan *multistakeholder*
 - Pemantauan

- 10 Perguruan Tinggi dan 11 Org Profesi
- Pengembangan program
 - Pelatihan
 - Pendampingan masyarakat

- 28 Perusahaan
- Perbaikan gizi karyawan
 - Edukasi masyarakat (pola makan sehat) & CSR

- 28 Organisasi Masyarakat
- Edukasi masyarakat
 - Pelatihan
 - Pemantauan

- 14 Mtra/Donor
- Dukungan teknis
 - Studi & *piloting* praktik baik

- Media
- Penyebarluasan Informasi dan praktik baik pada masyarakat

Struktur Organisasi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah



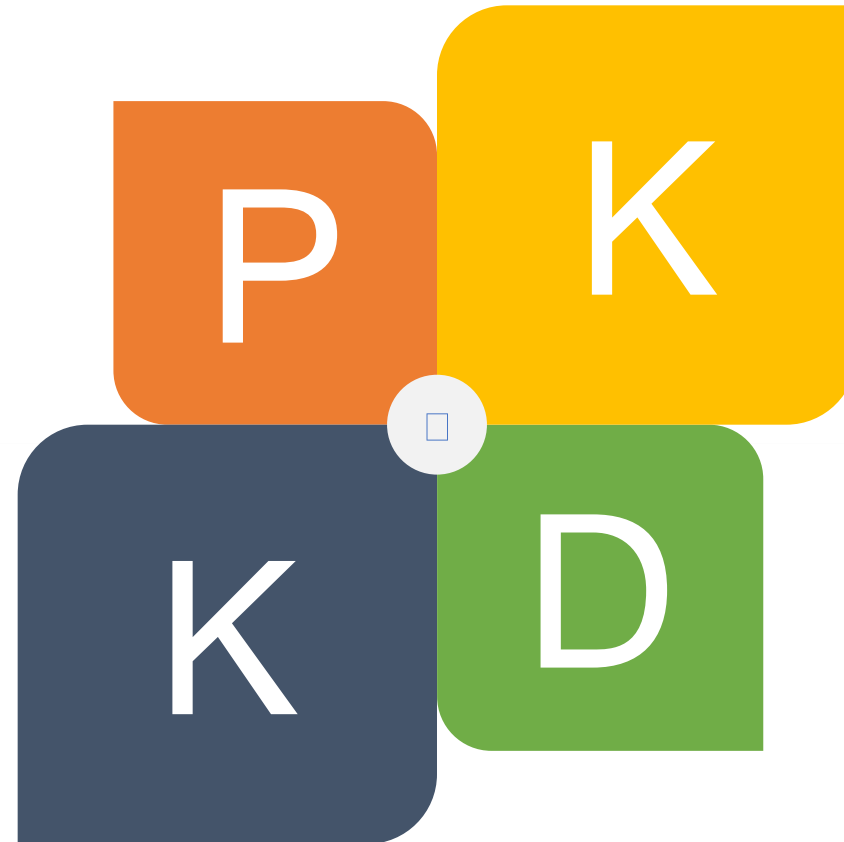
Provinsi

Koordinasi menggunakan **Tim RAD PG** atau **TKPKD** atau tim lainnya yang dinilai efektif untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting



Kabupaten/Kota

Koordinasi menggunakan **Tim RAD PG** atau **TKPKD** atau tim lainnya yang dinilai efektif untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting



Kecamatan

Koordinasi dipimpin oleh **Camat** melalui pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat

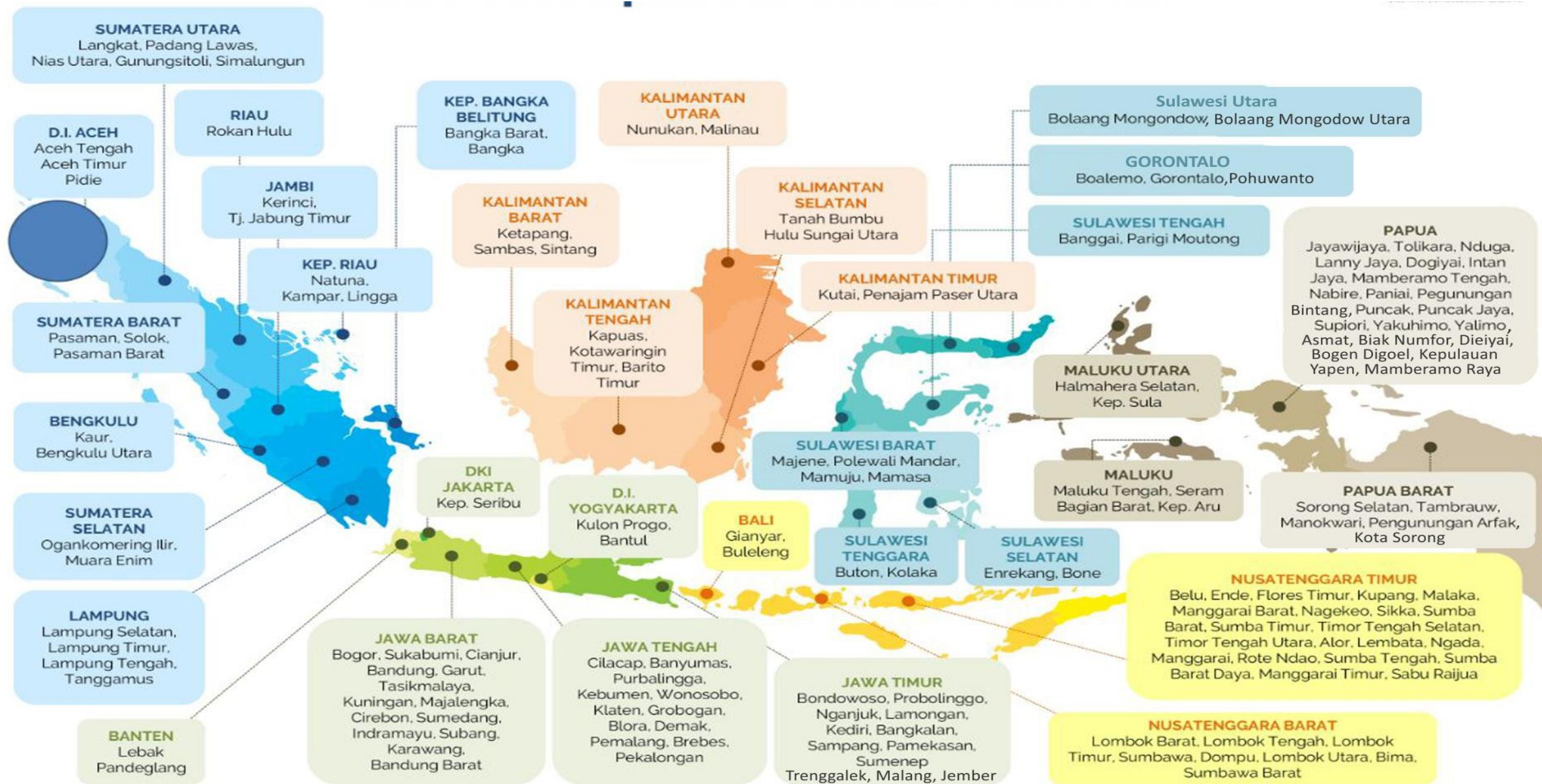


Desa

Kepala Desa menjadi penanggung jawab kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa



Peta Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2019





Kementerian PPN/
Bappenas

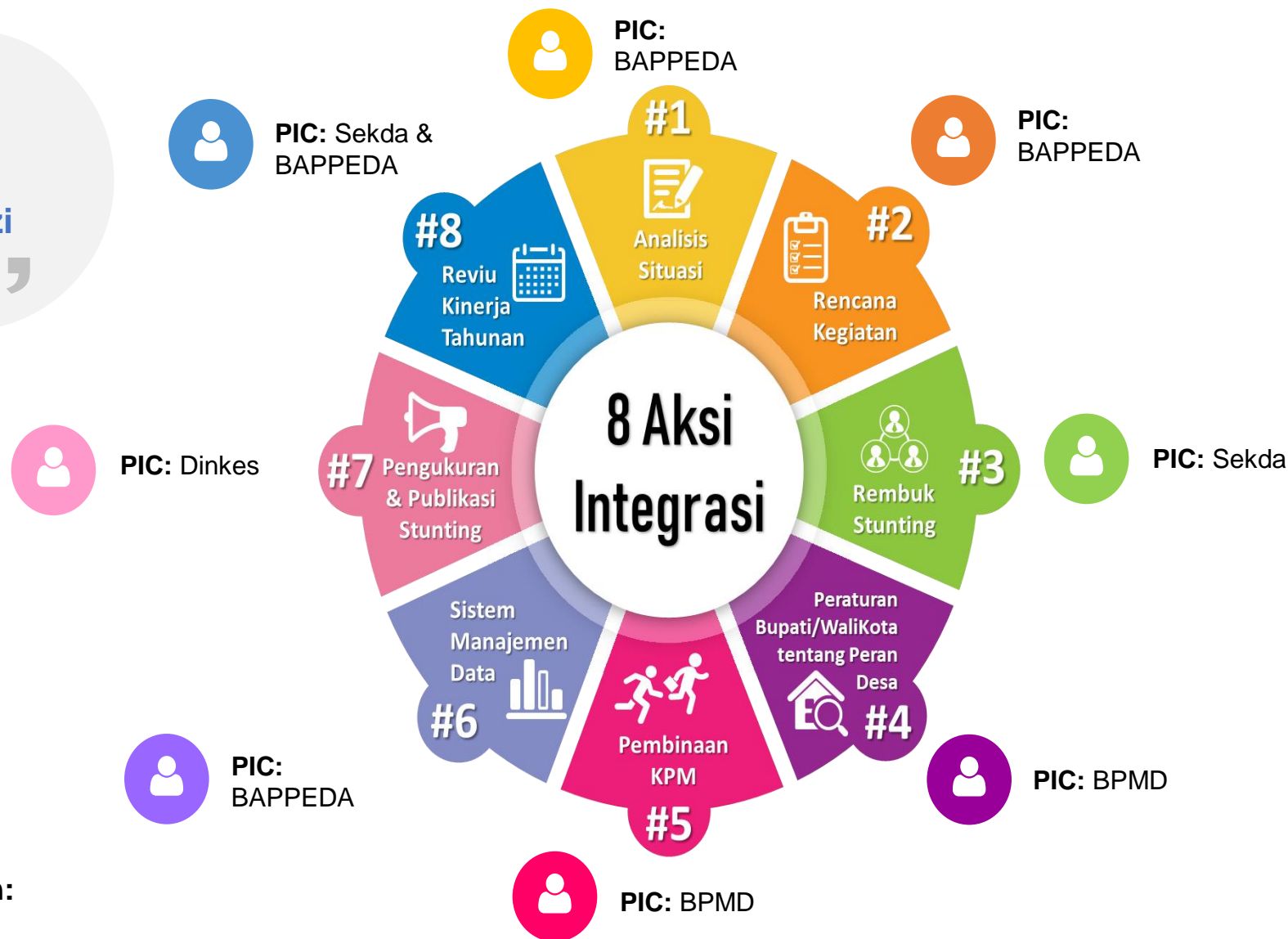
Delapan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota

“ Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam penurunan stunting ”



Dokumen lengkap dapat diunduh pada tautan:

<http://bit.ly/pedomanintegrasi>



Pengukuran data stunting dapat didukung melalui surveilans gizi

TAHAPAN PELAKSANAAN

INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

Bulan	Jadwal Reguler Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Jadwal Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi				Penanggung Jawab	
Januari	<ul style="list-style-type: none">• Musrenbang desa• Musrenbang kecamatan• Rancangan Awal RKPD	Aksi #1 Analisis Situasi	Aksi #2 Rencana Kegiatan	Aksi #3 Rembuk Stunting	Aksi #6 Sistem Manajemen Data	Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi Data Stunting	Aksi #1: Bappeda (PIC) dan OPD
Februari	<ul style="list-style-type: none">• Pagu Anggaran Indikatif• Rancangan Renja OPD• Forum OPD/Lintas PD						Aksi #2: Bappeda (PIC) dan OPD
Maret	<ul style="list-style-type: none">• Rancangan RKPD• Musrenbang Kabupaten/Kota	Aksi #4 Perbup/Perwali tentang Peran Desa	Aksi #5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Aksi #3: Sekda dan/atau Bappeda			
April	Rancangan akhir RKPD kab/kota			Aksi #4: BPMD			
Mei	Rancangan Perbup/Perwali RKPD			Aksi #5: BPMD			
Juni	Perbup/Perwali RKPD			Aksi #6: Bappeda (PIC) dan OPD			
Juli	Penyusunan KUA-PPAS			Aksi #7 Dinas Kesehatan			
Agustus	Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD	Aksi #8: Sekda dan Bappeda (PIC) dan OPD					
September	Penyusunan RKA OPD						
Oktober	Penyusunan APBD						
November	Pembahasan APBD dengan DPRD						
Desember	Penetapan APBD						
Jan-Feb tahun <i>n</i> +1		Aksi #8 Reviu Kinerja Tahunan					



Tahap Perencanaan dan Penganggaran

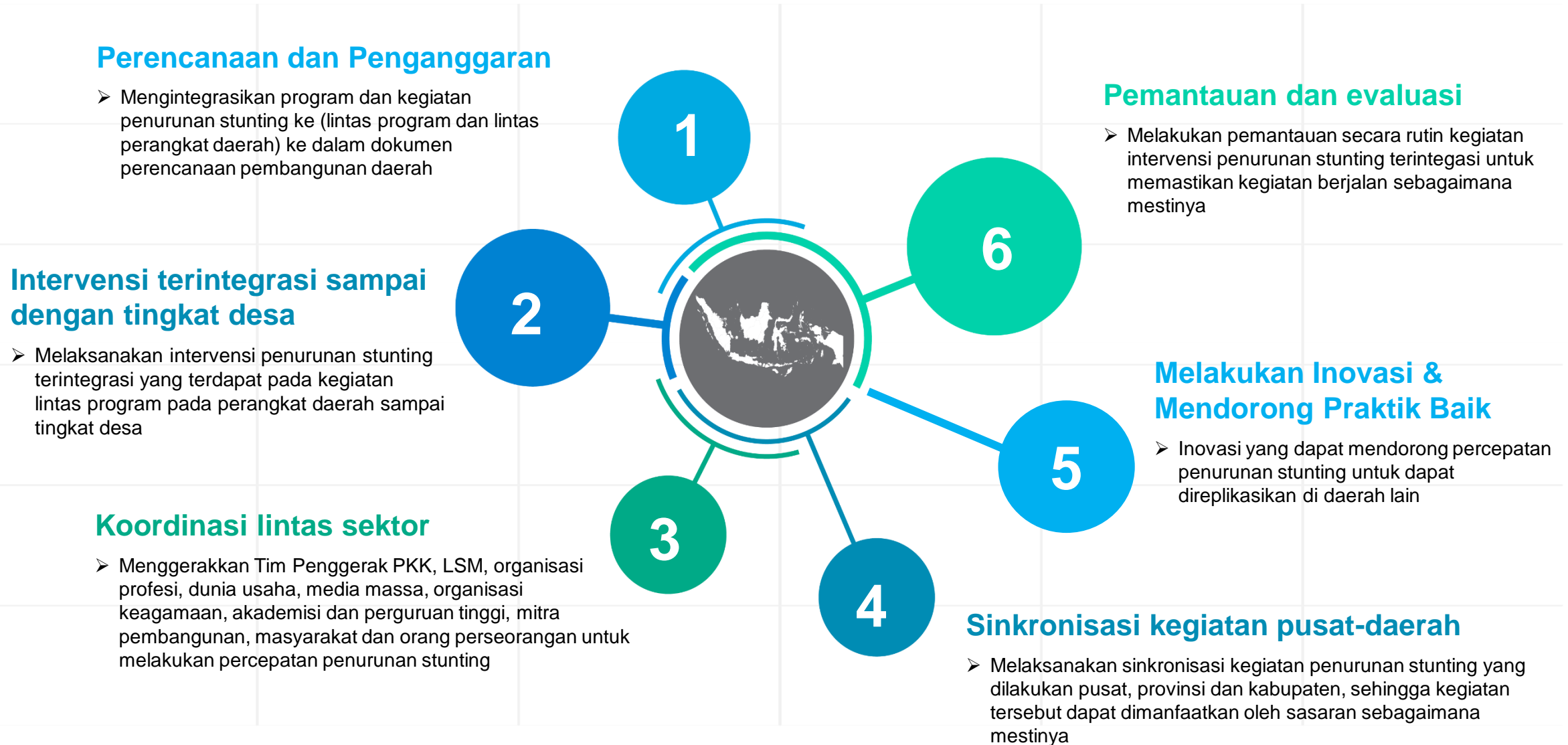


Tahap Pelaksanaan



Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Harapan kepada Pemerintah Daerah



Cegah Stunting, Itu Penting!



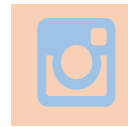
Kontak Kami



sekretariat1000hpk@bappenas.go.id



www.cegahstunting.id



gernas1000hpk



gernas1000hpk

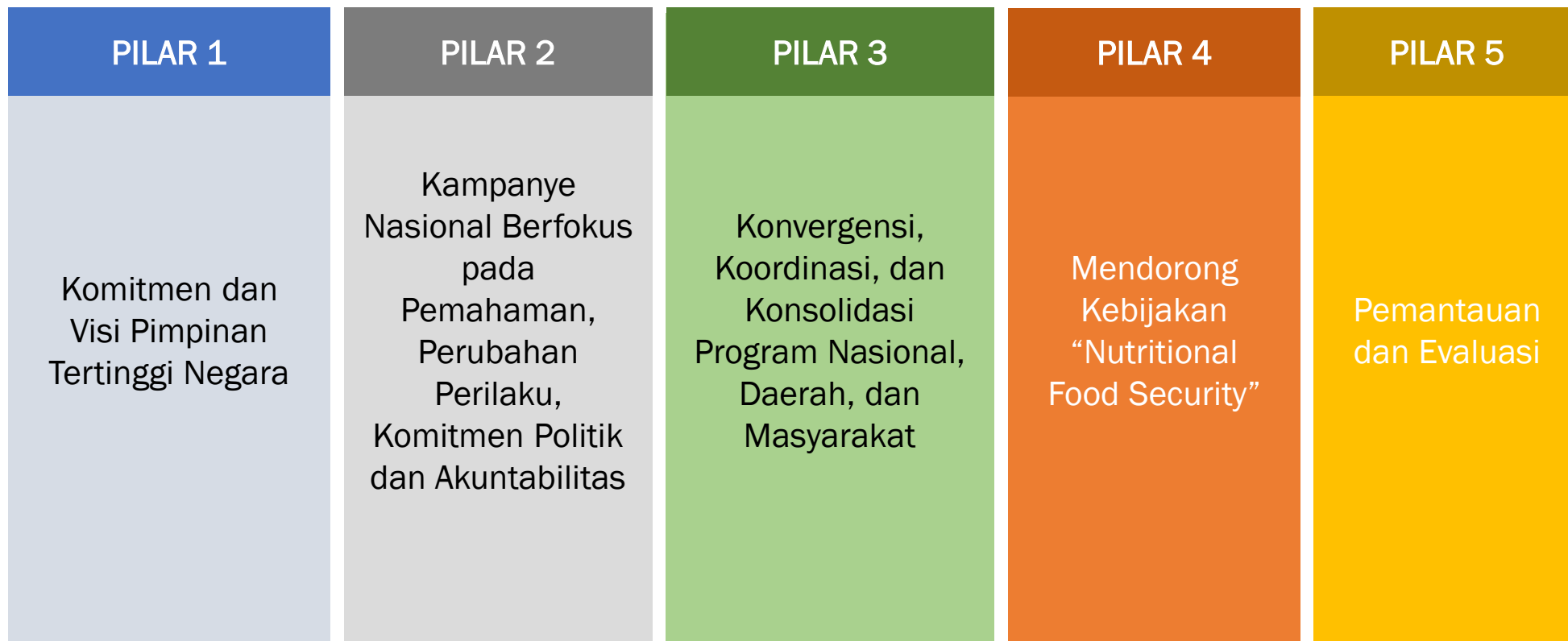


Sekretariat Stunting



Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng
Jakarta Pusat 10310

5 Pilar Pencegahan *Stunting*


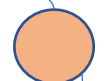









8 Aksi konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kab/Kota

**Tim TA-Pool
Ditjen Bina Bangsa, Kemendagri**

8 Aksi Konvergensi / Integrasi penurunan stunting

-  **Aksi #1 ANALISA SITUASI**
-  **Aksi #2 RENCANA KEGIATAN**
-  **Aksi #3 REMBUK STUNTING**
-  **Aksi #4 PERBUP / PERWALI TENTANG PERAN DESA**
-  **Aksi #5 KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)**
-  **Aksi #6 MANAJEMEN DATA**
-  **Aksi #7 PENGUKURAN & PUBLIKASI**
-  **Aksi #8 REVIU KINERJA TAHUNAN**



Aksi 1 : Analisa Situasi

Ruang lingkup

1. Analisis sebaran stunting
2. Analisis cakupan layanan, data supply, ketersediaan program/kegiatan
3. Analisis permasalahan dalam menargetkan layanan pada 1000HPK
4. Analisis kendala rumah tangga 1000HPK mengakses layanan
5. Analisis kondisi koordinasi antar institusi

OUTPUT

1. Prioritas alokasi sumber daya dan lokasi prioritas intervensi pencegahan stunting tahun berikutnya
2. Rekomendasi kebutuhan program/kegiatan baik melalui realokasi dan atau penambahan alokasi program.
3. Rekomendasi tindakan perbaikan penyampaian layanan yang perlu diprioritaskan untuk memastikan rumah tangga 1.000 HPK mengakses layanan.
4. Rekomendasi kebutuhan kegiatan untuk penguatan koordinasi, baik koordinasi antar OPD dalam hal sinkronisasi program/kegiatan maupun koordinasi antara kabupaten/kota dan desa dgn dukungan Kecamatan

Penanggungjawab

BAPPEDA (membentuk Tim pelaksana antar OPD)

Intervensi spesifik

	STUNTING		KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)									
Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING	Cakupan Bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan	Cakupan Ibu Hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT	Cakupan kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran)	Cakupan Ibu Hamil-K4	Cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A	Cakupan anak 12-23 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap	Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc	Cakupan remaja putri mendapatkan TTD	Cakupan layanan Ibu Nifas
GEDUNGAN	26	NULL	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BATUAN	25	NULL	100.00	36.67	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
PATEAN	25	NULL	100.00	100.00	100.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	NULL										
BABALAN	0	NULL	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
GUNGGUNG	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KARANG ANYAR	101	51.27	100.00	100.00	0.00	56.35	100.00	68.93	100.00	0.00	100.00	100.00
GANDING	120	43.96	100.00	88.33	0.00	88.64	88.33	100.00	87.04	6.96	100.00	100.00
LEGUNG BARAT	57	43.51	100.00	90.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	2.29	100.00	100.00
GADU BARAT	107	37.02	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.54	100.00	100.00
SOKARAME PASESER	31	36.47	100.00	100.00	100.00	100.00	69.70	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
KETAWANG LARANGAN	57	35.19	100.00	100.00	0.00	82.72	100.00	100.00	100.00	11.11	100.00	100.00
PANAGAN	25	32.05	100.00	100.00	100.00	85.90	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
JATE	47	31.33	0.00	65.00	100.00	0.00	65.00	100.00	90.00	0.00	0.00	100.00
SONOK	32	29.36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.08	0.00	0.00	100.00	100.00
POJA	22	28.57	0.00	100.00	0.00	94.81	93.75	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
LEBENG BARAT	70	28.34	100.00	89.09	100.00	93.12	89.09	100.00	65.52	1.21	100.00	100.00

Intervensi sensitif

	STUNTING		AIR MINUM DAN SANITASI		PAUD		PERLINDUNGAN SOSIAL			KETAHANAN PANGAN
Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting	Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD	Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda	Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan	Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT	Cakupan desa menerapkan KRPL
GEDUNGAN	26	NULL	0.00	100.00	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
BATUAN	25	NULL	0.00	95.44	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
PATEAN	25	NULL	0.00	100.00	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	NULL								
BABALAN	0	NULL	0.00	95.85	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
GUNGGUNG	2	100.00	0.00	86.36	0.00	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
KARANG ANYAR	101	51.27	0.00	49.89	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
GANDING	120	43.96	100.00	99.27	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGUNG BARAT	57	43.51	0.00	69.04	0.00	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
GADU BARAT	107	37.02	100.00	99.84	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
SOKARAME PASESER	31	36.47	0.00	89.93	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
KETAWANG LARANGAN	57	35.19	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PANAGAN	25	32.05	0.00	54.60	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
JATE	47	31.33	0.00	97.82	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
SONOK	32	29.36	0.00	70.37	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
POJA	22	28.57	0.00	65.25	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
LEBENG BARAT	70	28.34	0.00	100.00	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00

Desa stunting dengan data supply

Nama Desa	Fasilitas Posyandu	Faskes (Pustu dan Poskesdes)	Bidan Desa	Kader	Juru Imunisasi	Bidan Puskesmas	Dokter Puskesmas	Tenaga Petugas Gizi	Tenaga PromKes	Tenaga Sanitarian	Perawat	Alat Timbang Berat Badan	Alat Ukur Panjang Badan
	1	1 Pustu	1	5								1 Dacing	
DESA	2	0		10								1 Dacing	
4	1	1 Pustu	1	5								1 Dacing	
GEDUNGAN	2	0		10								1 Dacing	
BATUAN	2	1 Pustu		10								1 Dacing	
PATEAN	1	1 Poskesdes	1	5								1 Dacing	
	2	0		10								1 Dacing	
BABALAN	2	1 Poskesdes		10								1 Dacing	
GUNGGUNG	1	1 Pustu		5								1 Dacing	
KARANG ANYAR	1	1 Poskesdes	1	5								1 Dacing	
GANDING	2	1 Pustu	1	10								1 Dacing	
LEGUNG BARAT	2	1 Pustu		10								1 Dacing	
GADU BARAT	2	1 Pustu	1	10								1 Dacing	
SOKARAME PASE	1	1 Poskesdes		5								1 Dacing	
KETAWANG LARA	1	1 Pustu	1	5								1 Dacing	
PUSKESMAS	23	4 Poskesdes, dan 8 Pustu	7	115	1	2	2	3	1	1	16	15	3 di PKM

Ketersediaan anggaran dan kegiatan

ii/KABUPATEN/KOTA :					
SASI PELAKSANA : Dinas Perumahan dan Permukiman					
M : 1.04 01 27 10/PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH					
N :					
RINCIAN KEGIATAN	Indikator Output	Target Output	LOKASI SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
2			3	4	5
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT PEDESAAN	Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat	Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat	Nyamplong, Lebeng, Sogian, Tenonan, Kasengan, Karang Budi, Cempaka	2,682,493,500	APBD II
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT IBUKOTA KECAMATAN	Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat	Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat	Kabupaten.	995,051,000	APBD II
KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN	Kualitas pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman	Kualitas pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman	Kabupaten.	50,150,000	APBD II
SANITASI MASYARAKAT (SANIMAS)	Tersedianya sanitasi lingkungan berbasis masyarakat	Tersedianya sanitasi lingkungan berbasis masyarakat	Kabupaten.	146,547,500	APBD II

Aksi 2 : Rencana Kegiatan

Ruang lingkup

Hasil rekomendasi dari Aksi 1

OUTPUT

Rencana program/kegiatan untuk peningkatan cakupan dan integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.

Penanggungjawab

BAPPEDA (membentuk Tim pelaksana teknis antar OPD terkait)

Aksi 3 : Rembuk Stunting

Ruang lingkup

Rencana program/kegiatan dan anggaran untuk peningkatan cakupan dan integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.

OUTPUT

1. Komitmen penurunan *stunting* yang ditandatangani oleh bupati, perwakilan DPRD, kepala desa, pimpinan OPD dan perwakilan sektor nonpemerintah dan masyarakat.
2. Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan *stunting* yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya

Penanggungjawab

Sekda, Bappeda

Aksi 4 : Perbup / Perwali tentang Peran/Kewewenangan Desa

Ruang lingkup

Landasan hukum terkait peran desa dalam menurunkan stunting (Peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa)

OUTPUT

1. Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung integrasi intervensi penurunan stunting
2. Meningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat mendukung penurunan stunting
3. Menyediakan kader pembangunan manusia (KPM) untuk memfasilitasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di tingkat desa
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan penurunan stunting
5. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan penurunan stunting

Penanggungjawab

Sekda / Dinas PMD

Aksi 5 : Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Ruang lingkup

1. Tugas KPM dalam integrasi penurunan stunting di tingkat desa
2. Sumber daya dan operasional Pembiayaan KPM
3. Sistem insentif berbasis peningkatan kinerja KPM
4. Kinerja KPM dengan Dinas Layanan (OPD) terkait upaya penurunan stunting

OUTPUT

Mobilisasi KPM di seluruh desa berjalan dengan baik

Penanggungjawab

Dinas BPMD

Aksi 6 : Sistem Manajemen Data

Ruang lingkup

Semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir

OUTPUT

Data tersedia dan mudah akses untuk pengelolaan program penurunan *stunting*, kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi

Penanggungjawab

Bappeda

Aksi 7 : Pengukuran dan Publikasi Stunting

Ruang lingkup

- Memantau kemajuan pada tingkat individu.
- Mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan anak balita yang optimal.
- Menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku
- Peningkatan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya.
- Pemecahan masalah dan memantu proses perencanaan di level desa hingga kabupaten/kota.
- Advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program.

OUTPUT

- Status gizi anak sesuai umur
- Angka prevalensi *stunting* di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota

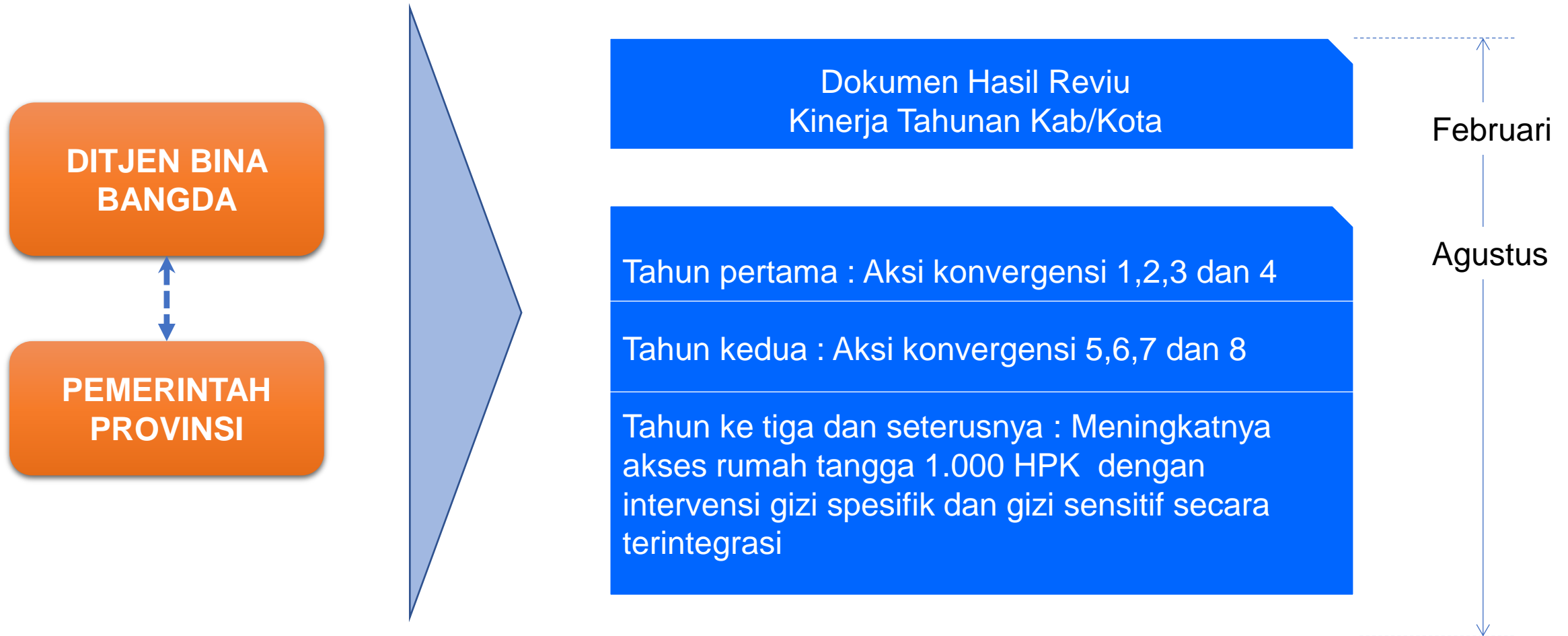
Penanggungjawab

Bappeda, Dinas Kesehatan

Memastikan Kab/Kota Melakukan Kegiatan sesuai Tahapan Aksi

Bulan	Jadual Reguler Perencanaan-Penganggaran	Tahapan PercepatanPenurunanStunting	PenanggungJawab	HasilAntara TahapanPercepatanPenurunanStunting
Januari	MusrenbangDesa MusrenbangKecamatan RancanganAwalRKPD	Pengorganisasian Aksi#1: Analisis Situasi Program	SekdaatauBappeda Bappeda(PIC)danOPD	Aksi#1dan2 ✓ MengetahuiSebaranAngkaStunting,GapIntervensi,danKendala penyampaianIntervensi,prioritasperbaikanuntukAnggaranandan penyampaianLayanan;
Februari	PaguAnggaranIndikatif RancanganJenjangOPD ForumOPD/LintasPD	Aksi#2: Penyusunan Rencana Kegiatan Aksi#3: Rembuk Stunting	SekdaDanBappeda(PIC) danOPD	✓ MelakukanLangkah-langkahperbaikanperencanaan,penganggaran danpenyampaianLayanan.
Maret	RancanganRKPD MusrenbangKabupaten/Kota	<div> PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA: (1) Aksi#4: Penetapan Perbup/perwali (2) Aksi#5: Mobilisasi KPM </div> <div> PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM RENCANA RPDP, RKPD, RAPBD/ RAPBD-P </div>	Bappeda(PIC)danOPD	Aksi#3,4,dan5 ✓ SetiapPk.PemerintahanpahamUpoksiDalamPenangananStunting ✓ Kecamatanpunyazumbersumberdayayangukupuntukmendukung layananDitingkatDesa ✓ KPMtersediaDiSetiapDesauntukmengawalikonvergensiLayanan ✓ DesamelakokasikanAnggaranuntukStunting ✓ DesamelaporkanSecaraRutin
April	RancanganPerbup/PerwaliRKPD		Bappeda(PIC)danOPD	Aksi#7 ✓ PemdamelakukanpengukuranstuntingsecaraReguler ✓ PemdamempublikasikanhasilpengukuranDanGapIntervensi stunting
Mei	RancanganAkhirRKPDKab/Kota		BappedaDanBPM	
Juni	PenyusunanKUA-PPAS		DinasKesehatan	
Juli	PenyusunanKUA-PPAS			
Agustus	PenyusunanKUA-PPASdenganDPRD			
September	PenyusunanRKADPD			
Oktober	PenyusunanAPBD	Aksi#6: Sistem Manajemen Data	Bappeda(PIC)danOPD	Aksi#6 ✓ PemdamengidentifikasiGapDataDanIntervensiStunting ✓ PemdamelakukanLangkah-langkahperbaikanGapDataStunting
November	PembahasanAPBDdenganDPRD			Aksi#8 ✓ PemdamelakukanReviewKinerjaSecaraReguler ✓ OPDmelaporkanKegiatanIntervensiDanIndikatorperbaikannya ✓ OPDmelaporkanIndikatorterkaitStuntingDibandingkanbaseline, danidentifikasiKendalaIndikatorYangHambatKemajuannya
Desember	PenetapanAPBD			✓ PemdamengidentifikasiperbaikanAlokasiAnggaranberdasarkan reviewKinerja
Februari+1		Aksi#8: Review Kinerja	SekdaDanBappeda(PIC) danOPD	

PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA



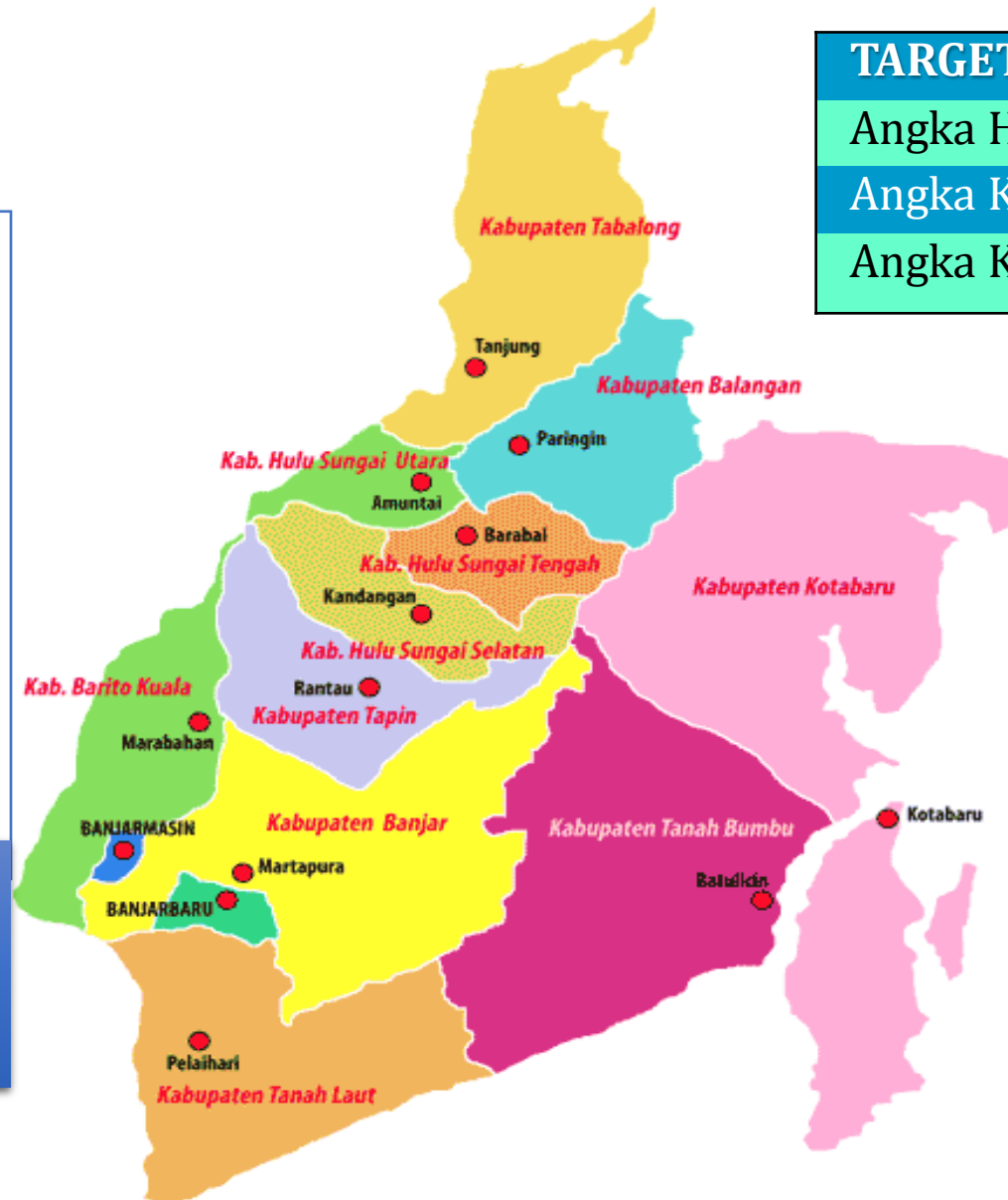


Alokasi anggaran penurunan stunting Pemprov Kalsel Tahun 2020

PRIORITAS KALSEL SEHAT TAHUN 2018

1. Perbaiki Gizi bagi Ibu Hamil
2. Perbaiki Kualitas Gizi Ibu dan Anak
3. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Penyuluhan Bahaya Perkawinan Usia Dini

Lokasi:
Kalimantan Selatan



TARGET KESEHATAN 2018

Angka Harapan Hidup	68,55
Angka Kematian Ibu	135
Angka Kematian Bayi	33

1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
3. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
4. Pelayanan Kesehatan Inklusi

Lokasi:
Kalimantan Selatan

PRIORITAS KALSEL SENTRA PANGAN TAHUN 2018

1. Penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya (Ikan Haruan dan Papuyu)
2. Pengembangan budidaya ikan lokal (Ikan Haruan dan Papuyu)

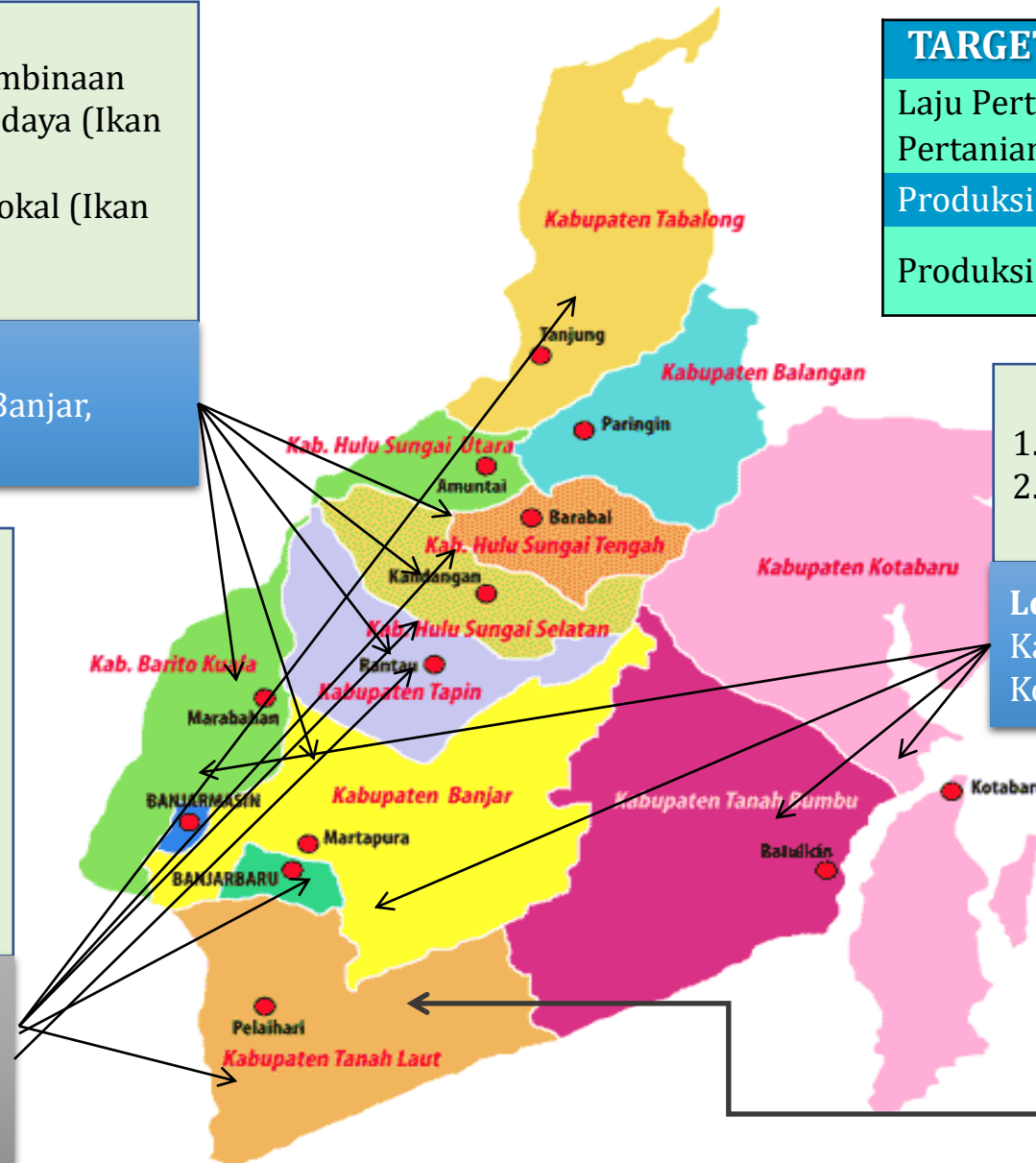
Lokasi:

Kabupaten HSU, HSS, HST, Tapin, Banjar, Barito Kuala

1. Pengembangan Kawasan Sayuran dan Aneka Tanaman terutama komoditas sayur dan cabai
2. Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian
3. Perluasan Areal Lahan

Lokasi:

Kabupaten Banjar, Tapin, HSS, HST, Tabalong, Tanah Laut, dan Balangan



TARGET 2018

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	4%
Produksi Daging	75.129
Produksi Ikan	395.000

1. Peningkatan Perikanan Tangkap
2. Pembangunan Unit Pengolahan Ikan

Lokasi:

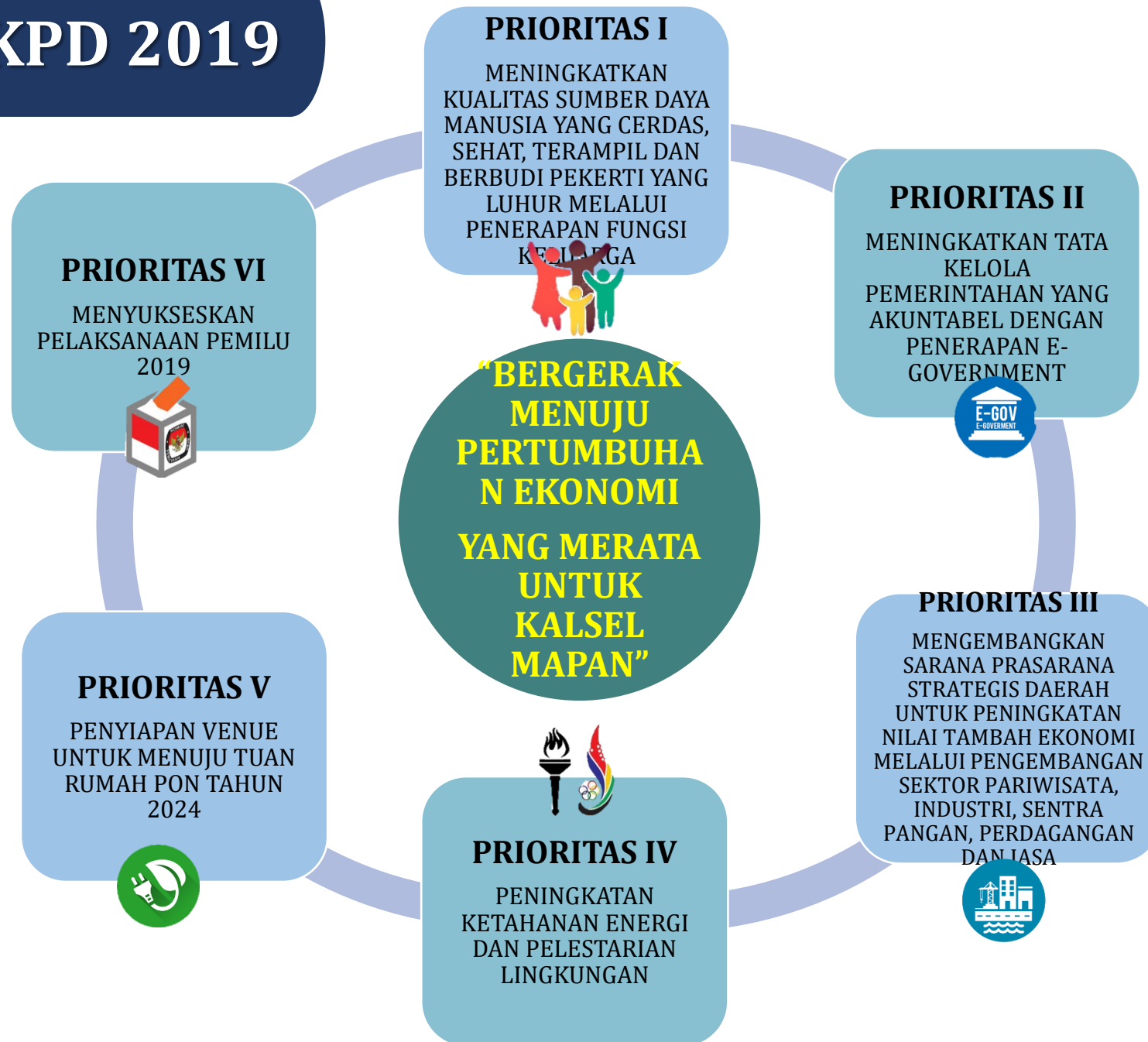
Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala

1. Peningkatan jumlah ternak bibit
2. Pemantapan pelaksanaan IB
3. Pengendalian pemotongan ternak produktif

Lokasi:

Kabupaten Tanah Laut

TEMA RKPD 2019



PRIORITAS I

SUB TEMA 1

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Sarana Prasarana Dasar

SUB TEMA 2

Peningkatan dan pemerataan akses Layanan Pendidikan Berkualitas dan berkarakter

PRIORITAS I
“MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, TERAMPIL DAN BERBUDI PEKERTI YANG LUHUR MELALUI PENERAPAN FUNGSI KELUARGA”

SUB TEMA 4

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Promosi Kesehatan berbasis masyarakat

SUB TEMA 3

Pengembangan dan pelestarian Unsur Budaya Kalsel

SUB TEMA 5

Peningkatan produktivitas dan perlindungan sosial serta kesetaraan Gender



PROGRAM PRIORITAS I

SUB TEMA 4

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PROMOSI KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT



1. Kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan
2. Peningkatan kesehatan masyarakat
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Peningkatan pelayanan kesehatan
5. Peningkatan sumberdaya manusia kesehatan
6. Peningkatan pelayanan kefarmasian



PRIORITAS III

SUB TEMA 1

Meningkatkan
Produksi Menuju
Sentra Pangan

SUB TEMA 2

Mengembangkan
Pariwisata Berbasis
Sumber Daya Lokal
Berorientasi Pasar
Internasional

SUB TEMA 3

Meningkatkan IKM

SUB TEMA 4

Meningkatkan
Perdagangan dan
Jasa Sambil Menjaga
Pemerataan

SUB TEMA 5

Pemerataan
Pembangunan Antar
Wilayah Melalui
Peningkatan Sarana
Prasarana Strategis
Daerah

PRIORITAS III

MENGEMBANGKAN
SARANA PRASARANA
STRATEGIS DAERAH
UNTUK PENINGKATAN
NILAI TAMBAH EKONOMI
MELALUI
PENGEMBANGAN
SEKTOR PARIWISATA,
INDUSTRI, SENTRA
PANGAN, PERDAGANGAN
DAN JASA

PRIORITAS III

SUB TEMA 1

MENINGKATKAN PRODUKSI MENUJU SENTRA PANGAN



- Peningkatan Produksi dan Produktivitas
- Pengembangan Sarana dan Prasarana
- Peningkatan Produksi Hasil Ternak
- Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
- Peningkatan mutu hasil dan investasi usaha perkebunan
- Pengembangan Usaha Perikanan
- Pengembangan perikanan tangkap
- Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat
- Pengembangan sumberdaya mineral, geologi dan air tanah
- Pengembangan Usaha, Permodalan / Pembiayaan & Legalitas Usaha KUMKM
- Program Peningkatan Produksi Menuju Sentra Pangan
- Pengelolaan Sumber daya Air



SINERGI PENANGANAN STUNTING DALAM PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMPROV KALSEL TAHUN 2019



Tim Pangan

DK.PANGAN 1 Program 6 Kegiatan Rp.2,2 M
DKPERIKANAN 1 Program 6 Kegiatan Rp.1,7 M
DTPH 2 Program 8 Kegiatan Rp.10,5 M
DISBUNAK 1 Program 4 Kegiatan Rp.1,9 M
DINSOS 2 Program 3 Kegiatan Rp.2,9 M



Tim Sanitasi

DPMD 1 Program 1 Kegiatan Rp.71 Juta
DPUPR 1 Program 5 Kegiatan Rp.25 M
DLH 1 Program 1 Kegiatan Rp.400 Juta



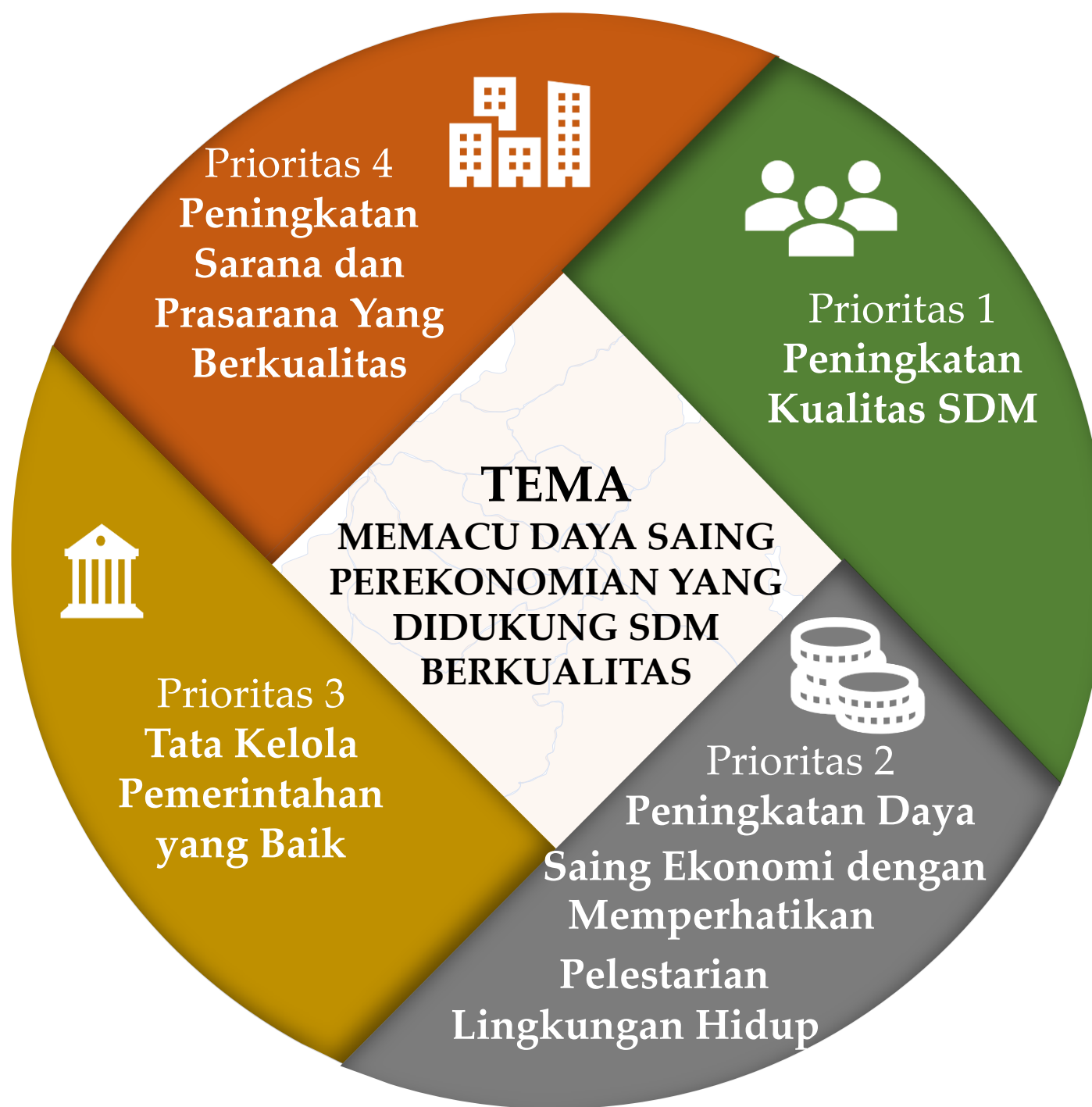
Tim Pola Asuh

DINKES 2 Program 32 Kegiatan Rp.58 M
DPPPA 2 Program 10 Kegiatan Rp.3,2M



Tim Lintas Sektor

DPMD 1 Program 2 Kegiatan Rp.3M
BAPPEDA 1 Program 3 Kegiatan Rp.3M





PENURUNAN PREVALENSI BALITA STUNTING

PROGRAM PRIORITAS

1. Program peningkatan kesehatan masyarakat
2. Program pencegahan dan pengendalian penyakit
3. Program pembinaan masyarakat dan kelembagaan desa
4. Program peningkatan kemandirian pangan
5. Program Pengembangan Keciptakarya

LOKUS PROGRAM PROV

1. Kab. Tabalong
2. Kab. Balangan
3. Kab. Tapin

LOKUS NASIONAL

1. Kab. HSU
2. Kab. Tanah Bumbu

SKPD TERKAIT

1. DINKES
2. DPPPA
3. DPMD
4. DPPPA
5. Dinas Ketahanan Pangan
6. DPUPR



Tim Sanitasi



Tim Pola Asuh



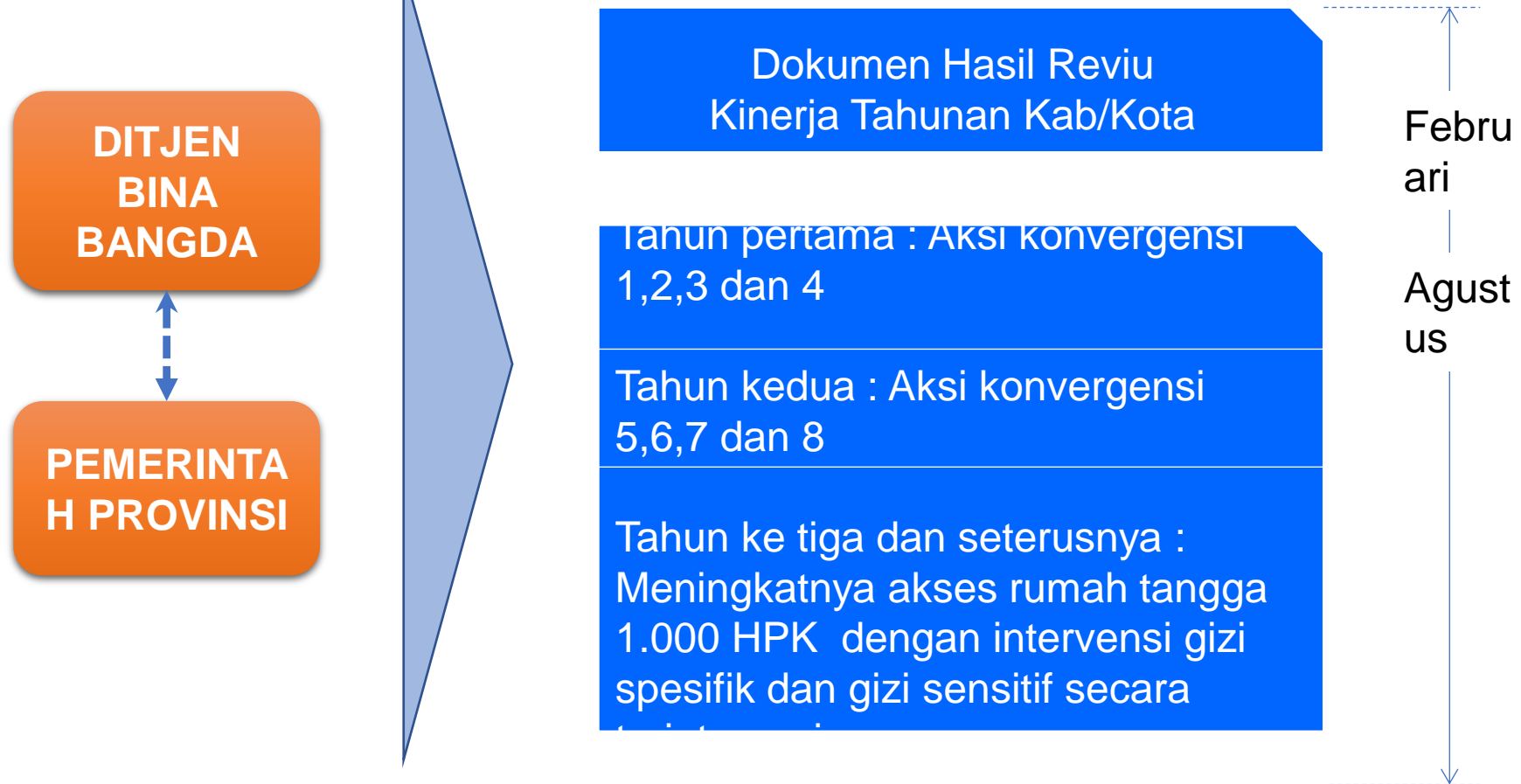
Tim Pangan



PENILAIAN KINERJA PEMDA DALAM KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING (KP2S)



PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA





Definisi Penilaian Kinerja

- ☐ Proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten/kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif).
- ☐ Perbaikan ini dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan.
- ☐ Pelaksanaan aksi integrasi ini diharapkan meningkatkan jumlah Rumah Tangga 1000 HPK yang dapat mengakses intervensi gizi secara lengkap (konvergen) di kabupaten/kota.

Tujuan Penilaian Kinerja

Untuk memberikan informasi mengenai

- Aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap kab/kota
- Perbandingan kinerja kab/kota dalam wilayah provinsi
- Pembelajaran yang dapat dimanfaatkan kab/kota dari kab/kota lain dalam wilayah provinsi (*peer learning*) untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi integrasi.

Ruang Lingkup Penilaian Kinerja

- Tahun pertama:

Hasil kinerja 4 aksi integrasi yang terkait dengan perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pemberian dukungan kepada desa (Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa).

- Tahun kedua:

- ✓ Hasil kinerja 4 aksi integrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (Pembinaan KPM, Perbaikan Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, Review Kinerja Tahunan);

- ✓ 4 aksi pertama yang dilakukan pada tahun kedua;

- ✓ 4 aksi pertama yang dilakukan kab/kota prioritasd baru.

- Pada Tahun ketiga:

Penilaian mencakup hasil yang diharapkan dari pelaksanaan aksi intergrasi yaitu meningkatnya konvergensi/integrasi intervensi gizi (baik spesifik maupun sensitif). Kinerja ini akan diukur melalui skor indeks khusus penanganan stunting yang dihitung secara independen oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tata Cara Pelaksanaan

1. Persiapan Tim Provinsi
2. Pengumuman Pelaksanaan (Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan)
3. Pemasukan Data/Laporan Kab/Kota
4. Pelaksanaan Penilaian
5. Kesepakatan Hasil
6. Pengumuman Hasil
7. Laporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja kepada Ditjen Bina Bangda

Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja

- ☐ Provinsi:
 - ✓ Gubernur menyampaikan rapor penilaian setiap kab/kota kepada bupati/walikota masing-masing.
 - ✓ Rapor penilaian diberikan dalam bentuk matriks kinerja kabupaten/kota beserta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan.
 - ✓ Menyusun /memperbaharui rencana pendampingan, termasuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi oleh kabupaten/kota.
- ☐ Kabupaten/kota:
 - ✓ Kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
 - ✓ Pelaksanaan tindak lanjut ini akan dipantau secara berkala oleh provinsi
- ☐ Ditjen Bina Bangda
 - ✓ Melakukan dan menyampaikan hasil verifikasi laporan pelaksanaan penilaian kinerja yang disampaikan oleh provinsi.
 - ✓ Mempublikasikan hasil penilaian kinerja.



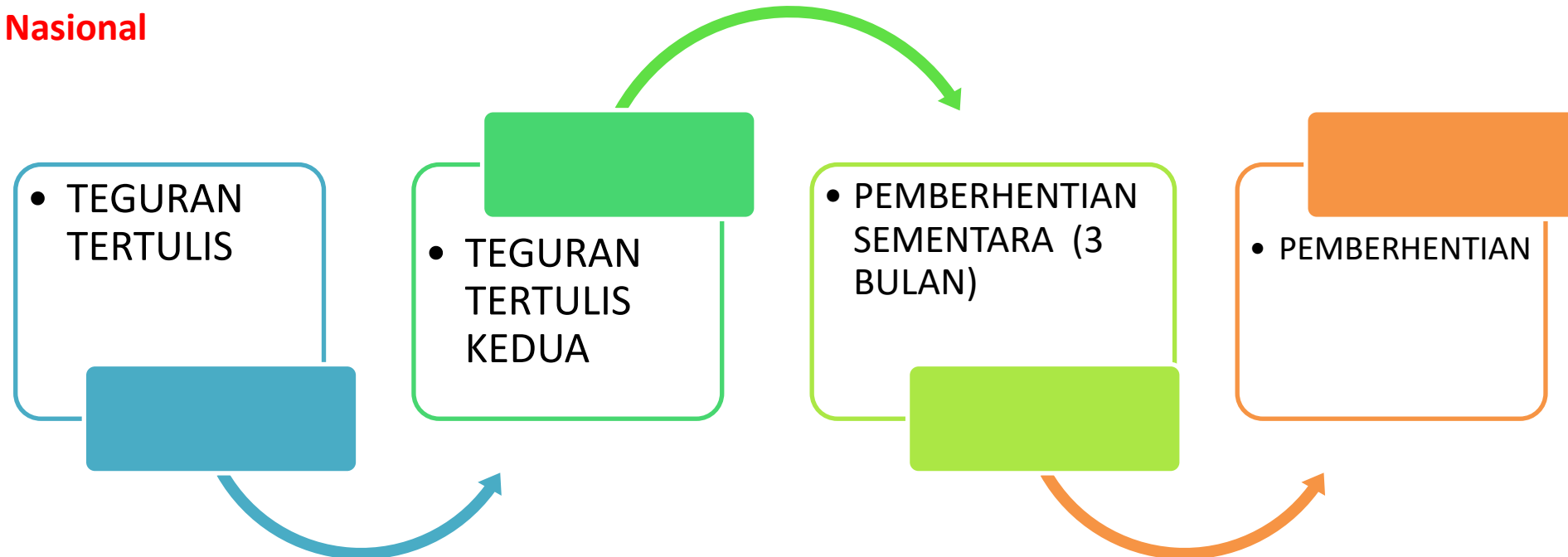
Lanjutan..... **PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

PERATURAN PEMERINTAH

NO. 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

Bab VI Pasal 36 Ayat (2) huruf a. : **PEMERINTAHAN DAERAH**

Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan **Program Strategis Nasional**



- Penjatuhan sanksi teguran tertulis didasarkan atas hasil verifikasi secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/ atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
- Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Outcome Pertemuan Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Kota Banjarbaru (Banjarbaru, 27 Maret 2019)

1. Surat Keputusan Walikota TK KP2S
2. Hasil aksi#1 (hasil Analisa yg menetapkan Kelurahan2 prioritas pencegahan stunting)
3. Aksi # 2 Rencana Kegiatan Tahun 2020

Terima kasih



Dengan data yg valid dan akurat
Dapat disusun perencanaan program yang baik
Indikator Kinerja yang terukur
memudahkan mengukur keberhasilan program